

**ANALISIS PENGARUH PAD, DANA TRANSFER, DAN
BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT STUDI 35 KAB/KOTA JAWA
TENGAH 2020-2023**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi

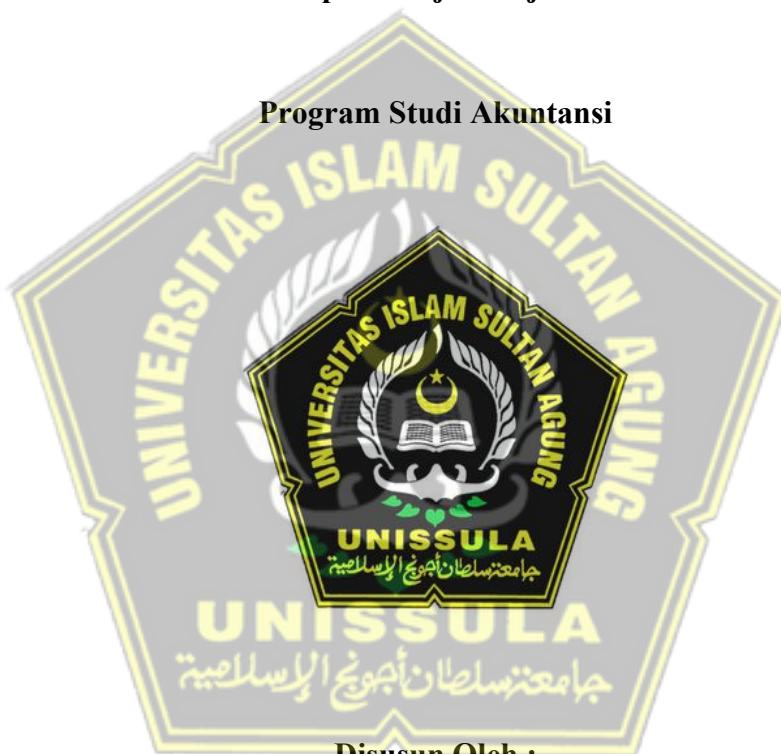


**Disusun Oleh :
Johan Aditya Nugraha
NIM : 31402400038**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENGARUH PAD, DANA TRANSFER, DAN
BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT STUDI 35 KAB/KOTA JAWA
TENGAH 2020-2023**

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1



**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Usulan Penelitian Untuk Skripsi

ANALISIS PENGARUH PAD, DANA TRANSFER, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI 35 KAB/KOTA JAWA TENGAH 2020-2023

Disusun Oleh :
Johan Aditya Nugraha
NIM : 31402400038

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan kepada Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 20 Mei 2025

Ketua Program Studi,

Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK 211403012

Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Akt.
NIK 211403010

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PAD, DANA TRANSFER, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI 35 KAB/KOTA JAWA TENGAH 2020-2023

Disusun Oleh :
Johan Aditya Nugraha
NIM : 31402400038

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan kepada Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 Agustus 2025

UNISSULA
جامعة سلطان أوجونج الإسلامية



Ketua Program Studi,

Pembimbing,

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK 211403012

Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Akt.
NIK 211403010

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johan Aditya Nugraha
NIM : 31402400038
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Analisis Pengaruh PAD, Dana Transfer, Dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Studi 35 Kab/Kota Jawa Tengah 2020-2023”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 14 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Johan Aditya Nugraha
NIM. 31402400038

ABSTRAK

“Analisis Pengaruh PAD, Dana Transfer, Dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Studi 35 Kab/Kota Jawa Tengah 2020-2023”

Penelitian ini menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, dengan berlandaskan kerangka teori *Inclusive Growth* dan *Fiscal Federalism*. Metode kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda diterapkan pada data data sekunder dipetik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan keuangan audited 35 kabupaten/kota untuk menguji hubungan mekanisme fiskal daerah dengan indikator pembangunan ekonomi dan sosial. Hasil menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan pada kedua variabel dependen ($p = 0,036$ untuk pertumbuhan ekonomi; $p = 0,011$ untuk IPM), sementara PAD berpengaruh signifikan hanya pada IPM ($p = 0,044$). Dana Transfer tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Model menjelaskan sekitar 24% varians Pertumbuhan Ekonomi (Adjusted $R^2 = 0,244$) dan 37 % varians IPM (Adjusted $R^2 = 0,374$). temuan ini menegaskan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pencatatan, pelaporan, serta realisasi fiskal merupakan kerangka utama dalam menilai kinerja daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Inclusive Growth Theory*, *Fiscal Federalism Theory*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Belanja Daerah, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

"Analysis of the Influence of Locally-Generated Revenue, Transfer Funds, and Regional Expenditure on Economic Growth and Improvement of Public Welfare: A Study of 35 Regencies/Cities in Central Java, 2020-2023"

This study analyzes the contribution of Local Revenue (PAD), Transfer Funds, and Regional Expenditure to economic growth and the improvement of community welfare in Central Java Province, grounded in the theoretical framework of Inclusive Growth and Fiscal Federalism. A quantitative method using multiple linear regression analysis was applied to secondary data drawn from the Central Statistics Agency (BPS) and audited financial reports of 35 districts/cities to test the relationship between regional fiscal mechanisms and economic and social development indicators. The results show that Regional Expenditure has a significant positive effect on both dependent variables ($p = 0.036$ for economic growth; $p = 0.011$ for the Human Development Index), while PAD has a significant impact only on the HDI ($p = 0.044$). Transfer Funds do not exhibit a significant influence. The model explains about 24 % of the variance in Economic Growth (Adjusted $R^2 = 0.244$) and 37 % of the variance in the HDI (Adjusted $R^2 = 0.374$). These findings underscore that regional financial management—including recording, reporting, and fiscal realization—constitutes the main framework for assessing regional performance that impacts economic growth and community welfare.

Keywords: Inclusive Growth Theory, Fiscal Federalism Theory, Locally Generated Revenue, Transfer Funds, Regional Expenditure, economic growth, improvement of public welfare

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik yang berjudul “Analisis Pengaruh PAD, Dana Transfer, Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Studi 35 Kab/Kota Jawa Tengah 2020-2023”.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamnya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Lisa Kartikasari, SE., M.Si., Akt, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
6. Kepada Bapak Dewanto Setiyo Groho, dan Ibu Sulisih selaku orangtua saya serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kepada Keluarga Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan terkhusus Sub Bagian Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang selalu memberikan semangat, waktu, dukungan, bantuan dan do'a selama ini.
8. Terimakasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi 2024 yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Agustus 2025

Penulis,


Johan Aditya Nugraha
NIM. 31402400038

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| HALAMAN PERSETUJUAN | 3 |
| HALAMAN PERSETUJUAN | 4 |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | 5 |
| ABSTRAK | 6 |
| ABSTRACT | 7 |
| KATA PENGANTAR..... | 8 |
| DAFTAR ISI..... | 10 |
| DAFTAR TABEL | 13 |
| DAFTAR GAMBAR..... | 14 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 15 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2 RUMUSAN MASALAH..... | 6 |
| 1.3 PERTANYAAN PENELITIAN..... | 7 |
| 1.4 TUJUAN PENELITIAN | 9 |
| 1.5 MANFAAT PENELITIAN | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 LANDASAN TEORI | 11 |
| 2.1.1 <i>Fiscal Federalism Theory</i> | 11 |
| 2.1.2 <i>Inclusive Growth Theory</i> | 12 |
| 2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 13 |
| 2.1.4 Dana Transfer/ Transfer Ke Daerah (TKD) | 14 |
| 2.1.5 Belanja Daerah | 15 |
| 2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi | 17 |
| 2.1.7 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 18 |
| 2.2 PENELITIAN TERDAHULU | 20 |

| | |
|---|----|
| 2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS | 25 |
| 2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Peningkatan Perekonomian | 26 |
| 2.3.2 Pengaruh Dana Transfer terhadap Peningkatan Perekonomian | 26 |
| 2.3.3 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Peningkatan Perekonomian | 27 |
| 2.3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat..... | 28 |
| 2.3.5 Pengaruh Dana Transfer terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 29 |
| 2.3.6 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 30 |
| 2.4 KERANGKA PENELITIAN..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 JENIS PENELITIAN | 33 |
| 3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN | 33 |
| 3.2.1 Populasi Penelitian..... | 33 |
| 3.2.2 Sampel Penelitian..... | 34 |
| 3.3 SUMBER DAN JENIS DATA | 34 |
| 3.4 METODE PENGUMPULAN DATA | 34 |
| 3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR..... | 35 |
| 3.5.1 Variabel Independen | 35 |
| 3.5.2 Variabel Dependen | 35 |
| 3.6 PENGUKURAN VARIABEL | 37 |
| 3.7 METODE ANALISIS DATA..... | 38 |
| 3.7.1 Uji Statistik Deskriptif | 38 |
| 3.7.2 Uji Asumsi Klasik | 38 |
| 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda | 39 |
| 3.7.4 Uji Goodness of FitModel | 40 |
| 3.7.5 Uji Hipotesis | 41 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 43 |

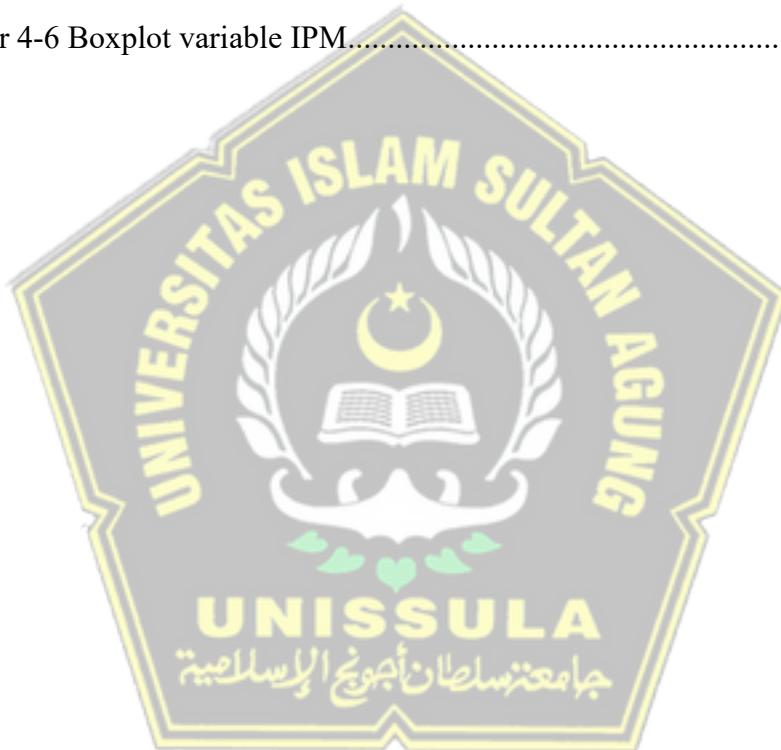
| | |
|---|-----------|
| 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian..... | 43 |
| 4.2 Statistik Deskriptif..... | 47 |
| 4.3 Analisis Data | 50 |
| 4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik | 50 |
| 4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda | 56 |
| 4.4.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi | |
| 56 | |
| 4.4.2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Terhadap IPM | 60 |
| 4.5 Pembahasan..... | 65 |
| 4.5.1 Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap | |
| Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | |
| 65 | |
| 4.5.2 Pembahasan Pengaruh Dana Transfer terhadap Peningkatan | |
| Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah..... | 67 |
| 4.5.3 Pembahasan Pengaruh Belanja Daerah terhadap Peningkatan | |
| Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah..... | 68 |
| 4.5.4 Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap | |
| Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa | |
| Tengah | 70 |
| 4.5.5 Pembahasan Pengaruh Dana Transfer terhadap Peningkatan | |
| Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 71 |
| 4.6.6 Pembahasan Pengaruh Belanja Daerah terhadap Peningkatan | |
| Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 73 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| 5.1 Kesimpulan | 75 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian..... | 77 |
| 5.3 Saran Penelitian | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |
| LAMPIRAN..... | 83 |

DAFTAR TABEL

| |
|--|
| Tabel 1-1 Data Realisasi PAD Dana Transfer dan Belanja Daerah Tahun 2022 ... 1 |
| Tabel 2-2 Penelitian Terdahulu..... 20 |
| Tabel 3-3 Variabel dan Indikator 36 |
| Tabel 4-4 Tabel Statistik Deskriptif..... 47 |
| Tabel 4-5 Hasil uji Normalitas..... 51 |
| Tabel 4-6 Hasil Uji Normalitas Kedua 52 |
| Tabel 4-7 Hasil Uji Normalitas 53 |
| Tabel 4-8 Uji Multikolinearitas 54 |
| Tabel 4-9 Uji Multikolinearitas 54 |
| Tabel 4-10 Uji Glejser Model Pertumbuhan Ekonomi 55 |
| Tabel 4-11 Uji Glejser Model Indeks Pertumbuhan Manusia 55 |
| Tabel 4-12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda..... 56 |
| Tabel 4-13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²) 57 |
| Tabel 4-14 Hasil Uji F 58 |
| Tabel 4-15 Hasil Uji t 59 |
| Tabel 4- 16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda..... 61 |
| Tabel 4-17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²) 62 |
| Tabel 4-18 Hasil Uji F 63 |
| Tabel 4-19 Hasil Uji F 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2-1 Kerangka Penelitian Analisis Pengaruh Pad, Dana Transfer, Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 31 |
| Gambar 4-2 Boxplot variable PAD..... | 45 |
| Gambar 4-3 Boxplot variable TKDD..... | 45 |
| Gambar 4-4 Boxplot variable Belanja | 46 |
| Gambar 4-5 Boxplot variable Ekonomi | 46 |
| Gambar 4-6 Boxplot variable IPM..... | 47 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|------|
| Lampiran 1 Data Sekunder PAD, Dana Transfer, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat | I |
| Lampiran 2 Boxplot Variable TKDD | V |
| Lampiran 3 Boxplot variable PAD | V |
| Lampiran 4 Boxplot Variable Belanja | VI |
| Lampiran 5 Boxplot Variable Pertumbuhan Ekonomi | VI |
| Lampiran 6 Boxplot variable IPM | VII |
| Lampiran 7 Hasil Statistik Deskriptif | VIII |
| Lampiran 8 Uji Normalitas 1 Pertumbuhan Ekonomi | IX |
| Lampiran 9 Uji Normalitas 2 Pertumbuhan Ekonomi | X |
| Lampiran 10 Uji Multikolinearitas Pertumbuhan Ekonomi | XI |
| Lampiran 11 Uji Normalitas IPM Kesejahteraan Masyarakat | XI |
| Lampiran 12 Uji Multikolinearitas IPM | XII |
| Lampiran 13 Uji Glejser Model Pertumbuhan Ekonomi | XII |
| Lampiran 14 Uji Glejser Indeks Pertumbuhan Manusia IPM | XII |
| Lampiran 15 Hasil Uji F Pertumbuhan Ekonomi | XIII |
| Lampiran 16 Hasil Regresi Linear Berganda Pertumbuhan Ekonomi | XIII |
| Lampiran 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²) | XIII |
| Lampiran 18 Uji t Pertumbuhan Ekonomi | XIV |
| Lampiran 19 Hasil Regresi Linear Berganda IPM | XIV |
| Lampiran 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²) | XIV |
| Lampiran 22 Uji t IPM (Kesejahteraan Masyarakat) | XV |
| Lampiran 21 Uji F IPM (Kesejahteraan Masyarakat) | XV |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan dua tujuan utama dalam pembangunan daerah. Di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini melalui pengelolaan keuangan yang efektif, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan belanja daerah (Bappenas, 2022). Meskipun terdapat potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan keuangan yang baik, realisasi pertumbuhan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan hasil yang tidak merata. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 5.1%, namun beberapa kabupaten seperti Semarang mencatatkan pertumbuhan hingga 6.5%, sementara kota lain seperti Magelang hanya tumbuh sebesar 3.8% (Setiawan & Rahmawati, 2021).

Tabel 1-1 Data Realisasi PAD Dana Transfer dan Belanja Daerah Tahun 2022

| Kabupaten/ Kota | PAD (Rp Miliar) | Dana Transfer (Rp Miliar) | Belanja Daerah (Rp Miliar) | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Keterangan |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Kota Semarang | 3.200 | 1.500 | 5.200 | 3,8 | Anggaran besar, pertumbuhan rendah |

| Kabupaten/ Kota | PAD (Rp Miliar) | Dana Transfer (Rp Miliar) | Belanja Daerah (Rp Miliar) | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Keterangan |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Kabupaten Banyumas | 2.400 | 1.200 | 4.000 | 3,5 | Anggaran besar, pertumbuhan rendah |
| Kota Surakarta | 2.800 | 1.100 | 4.100 | 3,7 | Anggaran besar, pertumbuhan rendah |
| Kabupaten Purbalingga | 1.200 | 800 | 2.500 | 6,2 | Anggaran lebih kecil, pertumbuhan tinggi |
| Kabupaten Wonosobo | 1.100 | 700 | 2.300 | 6,0 | Anggaran lebih kecil, pertumbuhan tinggi |
| Kabupaten Magelang | 1.400 | 900 | 2.800 | 5,8 | Anggaran lebih kecil, pertumbuhan tinggi |

Tabel 1. 1, sumber BPS

Berdasarkan data anggaran realisasi dan pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022, terlihat bahwa meskipun beberapa daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Daerah yang besar, pertumbuhan ekonomi mereka tidak selalu tinggi. Misalnya, Kota Semarang, Banyumas, dan Surakarta memiliki anggaran yang besar namun pertumbuhan ekonominya relatif rendah, sementara kabupaten seperti Purbalingga, Wonosobo, dan Magelang dengan anggaran lebih kecil justru menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun PAD, Dana Transfer, dan Belanja Daerah secara teori berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Sulaeman & Silvia, 2019; Marselino Wau & Mendrofa, 2022), efektivitas pengelolaan dan penggunaan anggaran

tersebut sangat menentukan hasilnya. Faktor-faktor seperti efisiensi pengelolaan, tata kelola keuangan, dan transparansi pelaporan menjadi kunci dalam memastikan bahwa dana yang tersedia dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah (Riyadi, 2022; Adhim et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan daerah, sangat penting untuk tidak hanya fokus pada besarnya pendapatan atau belanja daerah tetapi juga pada bagaimana output keuangan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang optimal seharusnya mampu mendorong peningkatan indikator kesejahteraan seperti penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita (Lisna et al., 2013). Dalam konteks pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah, penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap transaksi pendapatan maupun belanja dicatat secara sistematis melalui mekanisme pelaporan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Mardiasmo, 2019). Akuntansi sektor publik berperan sebagai alat pengendalian keuangan yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat (Halim & Abdullah, 2017). Namun, realitas menunjukkan bahwa meskipun beberapa kabupaten/kota berhasil memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, masih terdapat daerah yang belum mampu mengoptimalkan potensi fiskalnya, bahkan dengan sumber daya alam dan manusia yang memadai. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam efektivitas pengelolaan fiskal antar wilayah (Kusuma & Iskandar, 2022; Lisna et al., 2013).

PAD merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya sendiri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Misalnya, Sulaeman & Silvia (2019) menemukan bahwa peningkatan PAD dapat mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah. Namun, ada juga studi yang menunjukkan hasil berbeda, seperti Adhim et al. (2023) dan Andjarwati et al. (2021) yang melaporkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mungkin disebabkan oleh ketergantungan daerah pada dana transfer pusat sehingga PAD belum optimal berkontribusi.

Dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID), berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pemerataan pembangunan. Penelitian Marselino Wau dan Kristurman Jaya Mendrofa (2022) menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Namun, efektivitas dana transfer sangat bergantung pada tata kelola dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, Riyadi (2022), Nindita & Rahayu (2019), dan Puspitasari & Salisa (2017) menemukan bahwa dana transfer, khususnya DAU, tidak berpengaruh signifikan atau bahkan berpotensi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik.

Belanja daerah adalah realisasi penggunaan anggaran untuk berbagai program pembangunan yang harus dikelola secara efisien dan efektif. Studi oleh Sulaeman & Silvia (2019) dan Marselino Wau & Mendorfa (2022) menunjukkan bahwa belanja daerah, terutama belanja modal, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian lain seperti Amalia & Haryanto (2019) dan Akbar (2021) melaporkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dapat disebabkan oleh inefisiensi pengelolaan anggaran atau alokasi yang kurang tepat sasaran.

Nilai-nilai Islam seperti prinsip keadilan sosial dan transparansi juga menjadi landasan penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran publik (Hidayatullah & Azizah, 2019). Dengan demikian penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademis sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan guna meningkatkan efektivitas program pembangunan di tingkat lokal khususnya di Provinsi Jawa Tengah menuju pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai standar SAP akan tercipta tata kelola fiskal yang baik sehingga mendukung pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk mengkaji hubungan antara kebijakan fiskal daerah dengan capaian pembangunan ekonomi dan sosial, yang dituangkan dalam penelitian berjudul “*Pengaruh Pendapatan Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.*”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Masalah utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah belum optimalnya pencapaian kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota serta belum meratanya capaian indikator pembangunan manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan belanja daerah belum sepenuhnya efektif.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tersebut dicatat secara akurat dan dilaporkan secara transparan melalui mekanisme pelaporan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas penggunaan dana publik demi mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan ini menjadi krusial mengingat keberhasilan tata kelola fiskal daerah seharusnya tercermin dalam dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal pemerintah daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh variabel-variabel fiskal tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan

kerangka teori *Fiscal Federalism*, *New Public Management*, serta pendekatan *Inclusive Growth* dan *Sustainable Development*.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Transfer berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah Dana Transfer berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
6. Apakah Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Pertanyaan penelitian pertama berfokus pada sejauh mana PAD, sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah dan dicatat secara sistematis dalam laporan keuangan

pemerintah daerah sesuai standar akuntansi sektor publik, berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji peran dana transfer pusat yang dikelola dan dilaporkan oleh pemerintah daerah dalam mendorong dinamika ekonomi lokal melalui mekanisme pelaporan fiskal yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, penelitian ini menelaah pengaruh belanja daerah—yang merupakan realisasi penggunaan anggaran berdasarkan APBD—terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja tersebut harus dikelola secara efisien dan efektif sesuai prinsip-prinsip good governance serta standar pelaporan keuangan pemerintahan agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan inklusif.

Pertanyaan berikutnya mengarah pada hubungan antara variabel-variabel fiskal tersebut dengan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran hasil akhir dari kebijakan fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah memengaruhi efektivitas penggunaan PAD, dana transfer, dan belanja dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata.

Dengan demikian, keseluruhan rangkaian pertanyaan penelitian ini tidak hanya menilai besaran variabel-variabel fiskal tetapi juga memperhatikan aspek tata kelola keuangan publik melalui lensa akuntansi sektor publik sebagai landasan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh variabel-variabel fiskal utama terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah (APBD). Secara rinci, tujuan penelitian ini meliputi:

- 1) Menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Menguji secara empiris pengaruh Dana Transfer terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Menguji secara empiris pengaruh Belanja Daerah terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Menguji secara empiris pengaruh Dana Transfer terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 6) Menguji secara empiris pengaruh Belanja Daerah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1.5 MANFAAT PENELITIAN

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen sektor publik, akuntansi sektor publik, dan tata kelola pemerintahan. Studi ini memperkaya *body of knowledge* terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pemahaman teoritis melalui penerapan kerangka teori *Fiscal Federalism*, yang menjelaskan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah; *New Public Management*, yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik; serta pendekatan *Inclusive Growth* dan *Sustainable Development* sebagai landasan untuk pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

2) Manfaat Praktis

- (1) Dari Menyediakan data empiris serta kerangka analisis yang dapat dijadikan referensi atau dasar bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik maupun ekonomi pembangunan.
- (2) Memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pendapatan asli daerah, dana transfer, dan belanja daerah. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki tata kelola anggaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik.

- (3) Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- (4) Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang selanjutnya dapat dijadikan motivasi dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja OPD sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara prima.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 *Fiscal Federalism Theory*

Teori federalisme fiskal atau *Fiscal Federalism Theory* pertama kali dikembangkan oleh ekonom Richard Musgrave (1959) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Wallace E. Oates (1972). Teori ini menjelaskan bagaimana pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dapat menciptakan efisiensi alokasi sumber daya publik. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanjanya sendiri guna menjawab kebutuhan lokal secara lebih tepat dan efisien (Oates, 1999).

Menurut Oates (2005), desentralisasi fiskal dapat memberikan keuntungan berupa peningkatan efisiensi pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu elemen penting dalam teori ini adalah kemampuan daerah untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola dana transfer dari pusat, serta mengalokasikan belanja daerah secara efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Teori ini juga menyoroti pentingnya desain kebijakan fiskal yang adaptif di tingkat daerah. Dalam konteks Indonesia, penerapan desentralisasi fiskal pasca reformasi 1999 memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola keuangan secara

mandiri dengan tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (Ritonga, 2011). Oleh karena itu, fiscal federalism menjadi kerangka teori yang penting dalam mengevaluasi sejauh mana tata kelola keuangan daerah dapat memengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu provinsi dengan karakteristik fiskal yang beragam, penerapan teori ini dapat menjelaskan bagaimana kapasitas keuangan daerah mendorong output pembangunan. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami hubungan antara desentralisasi fiskal dan keberhasilan pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 *Inclusive Growth Theory*

Inclusive Growth Theory atau teori pertumbuhan inklusif merupakan konsep yang menggabungkan dimensi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan hasil pembangunan secara menyeluruh. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinilai dari peningkatan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di berbagai kelompok sosial (Ali & Son, 2007).

Pertumbuhan yang inklusif mencakup proses pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan, di mana hasilnya dirasakan oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Dalam kerangka ini, kebijakan fiskal pemerintah

daerah, seperti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan dana transfer, dan alokasi belanja publik, memainkan peran strategis dalam menciptakan akses yang merata terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Anand et al., 2013).

Asian Development Bank (ADB, 2011) menekankan bahwa pembangunan yang inklusif harus memperhatikan dimensi aksesibilitas, produktivitas, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, daerah yang mampu mengelola fiskalnya dengan baik dan efisien akan lebih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai level sosial. Teori ini juga mendukung pentingnya intervensi pemerintah untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan ekonomi. Teori ini memperkuat argumentasi bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif tidak hanya berdampak pada pertumbuhan secara agregat, tetapi juga pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber seperti pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lain yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2022). Peningkatan jumlah PAD dari sumber-sumber tersebut dapat mengindikasikan keberhasilan pengelolaan potensi dan sumber daya pendapatan daerah oleh pemerintah daerah yang juga menunjukkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal (Pasaribu, 2020). Apabila PAD memberikan kontribusi terbesar, hal ini menandakan bahwa daerah tersebut maju dalam sektor ekonomi

dan tidak bergantung terhadap dana transfer dari pusat (Sari et al., 2019). Salah satu cara mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah adalah dengan menggunakan rasio Local Fiscal Autonomy (LFA). Semakin tinggi rasio LFA, maka semakin besar proporsi PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Artinya, daerah menjadi lebih mandiri dan tida

2.1.4 Dana Transfer/ Transfer Ke Daerah (TKD)

TKD merupakan alokasi dana dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang daerah (Republik Indonesia, 2022). TKD terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Dana Keistimewaan, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). TKD, yang dahulu dikenal sebagai Dana Perimbangan, seringkali disebut sebagai dana transfer (grant) yang diberikan sebagai respons terhadap ketidakseimbangan ekonomi dan keuangan antardaerah (Wulandari & Iryanie, 2017). TKD bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan independensi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan (Wahyudin & Hastuti, 2020). Transfer ini juga bertujuan untuk memperbaiki penyediaan pelayanan publik agar mencapai standar minimum kualitasnya dan meningkatkan stabilitas perekonomian daerah (Pasaribu, 2020). Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pemerintah pusat bertanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan daerah atau upaya pengembangan daerah (Maulina et al., 2021).

DAU, DBH, dan DAK memiliki tujuan yang berbeda (Republik Indonesia, 2022). DAU ditujukan untuk meningkatkan layanan publik dan kapasitas keuangan daerah, DAK untuk mendanai program prioritas pemerintah pusat dengan penggunaan dana yang spesifik, dan DBH untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternal, khususnya di daerah non-penghasil, demi menciptakan kesetaraan regional. DAU adalah dana umum yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat (block transfer) dengan kebebasan penggunaan untuk pemerintah daerah, memberikan fleksibilitas alokasi dana sesuai kebutuhan lokal. Sementara DAK merupakan dana spesifik dengan tujuan dan program yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Local Dependence on Fiscal Transfer merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Semakin tinggi rasio tersebut, berarti sebuah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat.

2.1.5 Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup segala kewajiban finansial daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersihnya selama satu periode anggaran (Republik Indonesia, 2022). Belanja daerah dapat disusun melalui beberapa strategi penyusunan belanja daerah seperti penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, serta penganggaran berbasis kinerja. Alokasi dana belanja daerah yang dilakukan dengan akurat ke berbagai sektor yang dibutuhkan oleh warga akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zebua & Adib, 2014). Lebih lanjut, UU No. 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa setiap daerah harus mengalokasikan

setidaknya 40% dari total APBD untuk belanja infrastruktur pelayanan publik (di luar dana bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa). Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengeluaran daerah yang difokuskan pada infrastruktur sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Belanja Terdiri dari Belanja Modal dan Belanja Operasional. Belanja Modal adalah alokasi pengeluaran untuk pembelian aset tetap serta aset lain yang dapat digunakan dan akan memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun akuntansi (Republik Indonesia, 2010). Jenis pengeluaran ini mencakup pembelian tanah, gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, pembuatan infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan sistem jaringan, serta investasi dalam aset tetap yang lain. Belanja modal memungkinkan pemerintah untuk memiliki aset tetap yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan layanan publik. Dalam rangka memperkuat aset tetap, alokasi anggaran khusus dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk belanja modal dalam APBD (Saputra et al., 2021). Ruang lingkup belanja modal daerah pada penelitian ini adalah belanja modal daerah yang pembbiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Sampang. Alokasi dana untuk belanja modal daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah akan infrastruktur dan fasilitas yang esensial baik untuk operasional pemerintahan maupun layanan publik. Dengan meningkatkan belanja modal, diharapkan pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkat dan pada akhirnya dapat memacu perkembangan ekonomi daerah (Setiawan & Harsono, 2020).

Belanja operasional pemerintah merupakan komponen esensial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk

mendukung aktivitas rutin pemerintahan, seperti pembayaran gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaan aset. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan belanja operasional menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, perlu dicatat bahwa peningkatan belanja operasional tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan atau pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Fitrianty (2022) menunjukkan bahwa beberapa komponen belanja pemerintah daerah, seperti belanja modal dan transfer sosial, memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi .

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja operasional menjadi krusial. Penelitian oleh Nuryani dan Firmansyah (2020) menyoroti determinan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada situs web pemerintah daerah di Indonesia, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam meningkatkan kepercayaan publik . Secara keseluruhan, pengelolaan belanja operasional yang efektif dan efisien, didukung oleh transparansi dan akuntabilitas, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah ekspansi aktivitas ekonomi yang menjadi metode utama untuk meningkatkan penghasilan warga dan menciptakan kesempatan kerja baru (Boediono, 2009). Dengan kata lain, semakin besar

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, meski perlu juga memperhatikan faktor lain seperti distribusi pendapatan (Waryanto, 2017). Pertumbuhan ekonomi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada perbaikan layanan publik, pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi dari dalam dan luar negeri, serta revitalisasi lingkungan dan pengembangan sektor pertanian melalui pertumbuhan ekonomi (Saad & Kalakech dalam Iskandar, 2017). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi baik menggunakan PDRB Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Penelitian ini menggunakan PDRB Harga Konstan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi.

2.1.7 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah. Kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang layak, sejahtera, dan bermartabat, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, serta terciptanya rasa aman dan keadilan sosial. Menurut Sen (1999), kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari aspek ekonomi, namun juga melibatkan perluasan kebebasan dan pilihan hidup masyarakat untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.

Dalam konteks pemerintahan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui program-program pembangunan yang bersifat inklusif

dan berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga sering kali diukur melalui indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat. Berdasarkan penelitian Fitriani dan Susanti (2022), pengelolaan keuangan daerah yang efektif, khususnya dalam belanja publik seperti sektor pendidikan dan kesehatan, berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Kuncoro (2013), keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, alokasi anggaran yang berbasis kebutuhan masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara kebijakan fiskal daerah, kualitas tata kelola pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan saat ini.

Tabel 2-2 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti Tahun | Variabel, Sampel & Teknik Analisis | Hasil |
|----|---|--|---|
| 1 | Aditya, J. R., Sudrajat, G. A., & Pringgodani, M. G. (2024) | <p>Variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), Belanja Modal Daerah (BM)</p> <p>Sampel: Kabupaten Sampang periode 2013-2022,</p> <p>Metode: regresi linear berganda</p> | <ul style="list-style-type: none"> • PAD dan TKD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang. • Belanja modal daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. • Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • Model regresi memenuhi asumsi klasik dan uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$. |
| 2 | Rahmarsi et al. (2023) | <p>Variabel dependen: Kemiskinan</p> <p>Variabel Independen: PAD, DAU, DAK</p> <p>Variabel Intervening: Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Sampel: 35 Kab/Kota Jateng</p> <p>Metode: Path Analysis</p> | <ul style="list-style-type: none"> • PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan ke kemiskinan. • Semua berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. • Efek tidak langsung ke kemiskinan tidak signifikan. • Pertumbuhan belum efektif menurunkan kemiskinan. |

| No | Peneliti Tahun | Variabel, Sampel & Teknik Analisis | Hasil |
|----|--|--|---|
| 3 | Jefri Alfin Sinaga et al. (2023) | Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: PAD, DAU, DAK Sampel: Kab. Simalungun Metode: <i>Regresi Linier</i> | <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi dana publik diperlukan. DAK signifikan pengaruh pertumbuhan ekonomi. PAD & DAU tidak signifikan. DAK paling efektif dorong pembangunan. PAD belum optimal. Belanja perlu efisiensi. |
| 4 | Monica Luxsian & Jean Elika Marna (2024) | Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: PAD, DAU, DAK Sampel: Kab/Kota Sumbar Metode: <i>Regresi Linier</i> | <ul style="list-style-type: none"> PAD & DAU signifikan positif. DAK tidak signifikan. Transfer fiskal penting. Perlu penguatan anggaran lokal. Kelembagaan berperan penting. |
| 5 | Ida Ayu Putu Mega Rosita & I Ketut Sutrisna (2024) | Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan Variabel Mediasi: Pertumbuhan Ekonomi Sampel: Kab/Kota Bali Metode: Path Analysis | <ul style="list-style-type: none"> PAD & Dana Perimbangan pengaruh kesejahteraan. Efek langsung & tidak langsung signifikan. Belanja publik berdampak positif. Perlu perencanaan berbasis hasil. Sektor produktif perlu didorong. |
| 6 | Putri Intan Mulyani & Poniman (2024) | Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: PAD, DAU Sampel: Kab/Kota Jawa Timur Metode: <i>Regresi Panel</i> | <ul style="list-style-type: none"> PAD tidak signifikan. DAU & DBH negatif signifikan. Simultan signifikan. Belanja tidak efektif. Efisiensi anggaran perlu ditingkatkan. |
| 7 | Dewi Susanti & Tony | Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: PAD, DAU | <ul style="list-style-type: none"> PAD & DAU signifikan positif. Kapasitas fiskal penting. |

| No | Peneliti Tahun | Variabel, Sampel & Teknik Analisis | Hasil |
|----|---|--|--|
| | Seno Aji (2021) | Sampel: Kab/Kota Bali Metode: Regresi Panel | <ul style="list-style-type: none"> • Kombinasi PAD & DAU dorong pertumbuhan. • Belanja harus produktif. • Sarankan anggaran berbasis output |
| 8 | Komang W. Febriyan ti & N.A.W. T. Dewi (2024) | Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: PAD, DAU, DAK Sampel: Kab/Kota Bali Metode: Regresi Linier | <ul style="list-style-type: none"> • PAD signifikan ke belanja modal. • DAU & DAK tidak signifikan. • Pertumbuhan moderasi PAD. • Tidak moderasi DAU/DAK. • Perlu peningkatan PAD. |
| 9 | Meilita L. Anwar (2016) | Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi & Kemiskinan Variabel Independen: DAU, DAK, PAD Sampel: Kab/Kota Bali Metode: Analisis regresi linear berganda | <ul style="list-style-type: none"> • DAU signifikan ke pertumbuhan. • PAD & DAK tidak signifikan. • Simultan pengaruh kemiskinan. • PAD & DAK tidak signifikan ke kemiskinan. • DAU perlu dimanfaatkan optimal. |
| 10 | Rendy A. & Adhi P.S. Wibowo (2020) | Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: PAD, DAU, DAK, DBH; Sampel: 33 Provinsi Metode: Data Panel | <ul style="list-style-type: none"> • PAD, DAK, DBH signifikan. • DAU tidak signifikan. • Pertumbuhan moderasi positif PAD/DAU. • Moderasi negatif DAK/DBH. • Efisiensi dana transfer disarankan. |
| 11 | Rekha N. Putri & Wardihan Sabar (2023) | Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: PAD, Belanja Modal Sampel: Kab. Jeneponto Metode: Path Analysis | <ul style="list-style-type: none"> • PAD tidak signifikan ke pertumbuhan. • Belanja modal signifikan ke pertumbuhan. • PAD negatif signifikan ke kemiskinan. • Belanja modal tidak signifikan ke kemiskinan. • Belanja → pertumbuhan → turunkan kemiskinan. |



Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|
| 1 | Aditya, J. R., Sudrajat, G. A., & Pringgodani, M. G. (2024) | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan PAD, Dana Transfer, dan Belanja Daerah sebagai variabel independen. • Fokus pada pengaruh variabel fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. | <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Variable independen Kesejahteraan masyarakat. • hanya berfokus menggunakan data sekunder. • berfokus pada 35 Fokus pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2020-2023. |
| 2 | (Setiawan & Harsono, 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan PAD, Dana Transfer, dan Belanja Daerah sebagai variabel independen. • Fokus pada pengaruh variabel fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. • Metode analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu hanya menggunakan Dana Transfer dan Belanja Daerah sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini ditambahkan variabel PAD. • Penelitian terdahulu fokus pada Kabupaten Sampang, sedangkan penelitian ini fokus pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2020-2023. |
| 3 | (Pasaribu, 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Dana Transfer dan Belanja Daerah sebagai variabel independen. • Mengukur kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu tidak memasukkan PAD sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini memasukkan PAD. • Penelitian terdahulu hanya mengukur kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini mengukur juga pertumbuhan ekonomi. |

| No | Peneliti Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------------------|--|---|
| 4 | (Fitrianty, 2022) | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data kuantitatif dan analisis regresi. | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan PAD dan Belanja Daerah sebagai variabel independen. • Fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah • Menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu tidak memasukkan Dana Transfer sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini memasukkan Dana Transfer. • Penelitian terdahulu menggunakan data nasional, sedangkan penelitian ini fokus pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. |
| 5 | (Nuryani & Firmansyah, 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel fiskal daerah sebagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. • Menggunakan data kuantitatif dan analisis statistik deskriptif serta regresi. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu hanya fokus pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini juga mengkaji pertumbuhan ekonomi. • Penelitian terdahulu tidak memasukkan Dana Transfer sebagai variabel, sedangkan penelitian ini memasukkan Dana Transfer. |

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Peningkatan Perekonomian

Perekonomian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah dan berperan strategis dalam mendorong peningkatan perekonomian. Dengan PAD yang tinggi, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Teori fiskal desentralisasi menjelaskan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal kuat dapat lebih responsif dalam merancang kebijakan ekonomi berbasis potensi lokal (Oates, 1972).

Penelitian Purwanto dan Wibowo (2021) juga menunjukkan adanya hubungan positif antara PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan penelitian Royda, & Dinarossi Utami. (2023) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, efektivitas PAD dalam meningkatkan perekonomian sangat ditentukan oleh tata kelola anggaran yang tepat sasaran dan efisien, sehingga pemanfaatan PAD yang optimal dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dirumuskan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah positif terhadap Peningkatan Perekonomian.

2.3.2 Pengaruh Dana Transfer terhadap Peningkatan Perekonomian

Dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), memiliki peran penting

dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah, khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas. Dana ini berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal dan mendorong penyediaan layanan publik serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi lokal.

Berdasarkan penelitian Herawati dan Wahyuni (2021), dana transfer berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena memperluas kapasitas belanja pemerintah daerah di sektor-sektor produktif hal ini sejalan dengan penelitian Pinho, C., Varum, C., & Antunes, M. (2015) menemukan bahwa dana transfer (structural funds) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional,. Namun demikian, efektivitas dana transfer dalam mendorong peningkatan perekonomian sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Dana Transfer positif terhadap Peningkatan Perekonomian.

2.3.3 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Peningkatan Perekonomian

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan sektor-sektor strategis daerah. Alokasi belanja yang tepat sasaran, khususnya pada sektor ekonomi dan infrastruktur, dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing daerah.

Penelitian Fitriyani dan Cahyono (2021) menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika difokuskan pada pengeluaran produktif hal ini sesuai dengan penelitian Siregar, O. K. (2017) rasio belanja daerah terhadap PDB memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pengaruh belanja daerah terhadap peningkatan perekonomian sangat bergantung pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaannya, sehingga diperlukan tata kelola yang baik agar belanja publik benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hipotesis yang diterapkan sebagai berikut:

H3 : Belanja Daerah positif terhadap Peningkatan Perekonomian.

2.3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. PAD yang dikelola secara optimal memungkinkan pemerintah daerah menyediakan layanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan penelitian Wulandari dan Hidayat (2020), PAD memiliki hubungan positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan dan Muta'ali (2019) semakin tinggi kemampuan keuangan daerah, termasuk PAD, maka akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampak tersebut sangat dipengaruhi oleh

efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga penguatan tata kelola menjadi kunci agar PAD benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Sesuai uraian di atas, diterapkan hipotesis penelitian:

H4 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.3.5 Pengaruh Dana Transfer terhadap Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat

Transfer daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, merupakan sumber pembiayaan penting bagi daerah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transfer ini membantu daerah, terutama yang memiliki PAD rendah, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Herawati dan Wahyuni (2021) menemukan bahwa transfer daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga sejalan dengan penelitian Sania, N., Yamin, N. Y., Paranoan, S., & Tanra, A. A. M. (2024) bahwa dana transfer dari pemerintah pusat memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal daerah, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, efektivitas dana transfer sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran di daerah agar

manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh masyarakat. Sesuai uraian di atas, diterapkan hipotesis penelitian:

H5 : Dana Transfer berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.3.6 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Belanja daerah berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Belanja yang dialokasikan secara tepat dan efisien mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan.

Fitriyani dan Cahyono (2021) menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM di berbagai daerah di Indonesia dan Sania, N., Yamin, N. Y., Paranoan, S., & Tanra, A. A. M. (2024) bahwa belanja daerah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, agar belanja daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan, diperlukan perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat, serta tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Sesuai uraian di atas, diterapkan hipotesis penelitian:

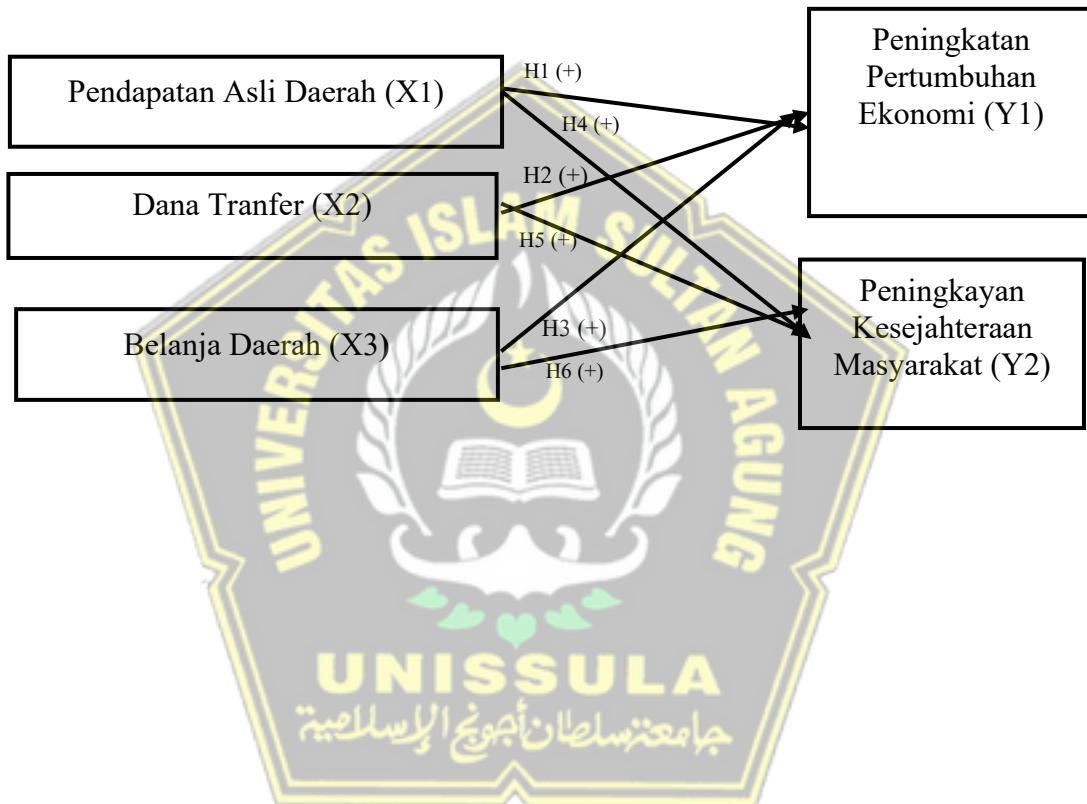
H6 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.4 KERANGKA PENELITIAN

Model kerangka penelitian menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Transfer, Belanja Daerah sebagai variabel independen, serta Peningkatan

Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabel dependen. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2-1
Kerangka Penelitian Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan hubungan variabel X dengan variabel Y. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, dimana basis yang digunakan adalah filsafat positivisme. Filsafat positivisme melihat fenomena secara konkret, terukur dan menilai hubungan dengan sebab-akibat (Sugiyono, 2014). Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang terstruktur dan sistematis dari proses awal penelitian sampai dengan akhir Penelitian (Sahir, 2022a). Proses Penelitian Kuantitatif dilaksanakan dengan proses deduktif dimana dalam perumusan hipotesis terbentuk dari menjawab rumusan masalah yang dikaitkan dengan teori. Hipotesis tersebut diuji dengan populasi dan sampel tertentu serta dianalisis dengan sifat kuantitatif atau statistik sesuai keadaan di lapangan (Sugiyono, 2014).

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah suatu wilayah yang general dan terdiri dari objek/subjek yang memiliki identitas khusus dimana oleh peneliti ditetapkan untuk dipelajari, diteliti dan kemudian ditarik kesimulannya (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Dengan Populasi APBD Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa tengah

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat khusus yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel Sampling jenuh. Sampel jenuh mengambil semua semua populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2014). Pada Penelitian ini sampel yang dipilih adalah APBD 35 Kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2023.

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak lain atau dokumen (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini seluruh data dikumpulkan melalui Data Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan keuangan Audited 35 Kabupaten Kota Jawa Tengah periode 2020-2023.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dokumen atau laporan resmi dari instansi pemerintah yang dipublikasikan secara daring. Metode dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data sekunder yang bersifat otentik dan relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Data tersebut dicatat dan dikompilasi dalam format panel, yaitu kombinasi antara data cross-section dan time-series, guna memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap variasi antar daerah dan perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau EViews, yang

umum digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel (Gujarati & Porter, 2010).

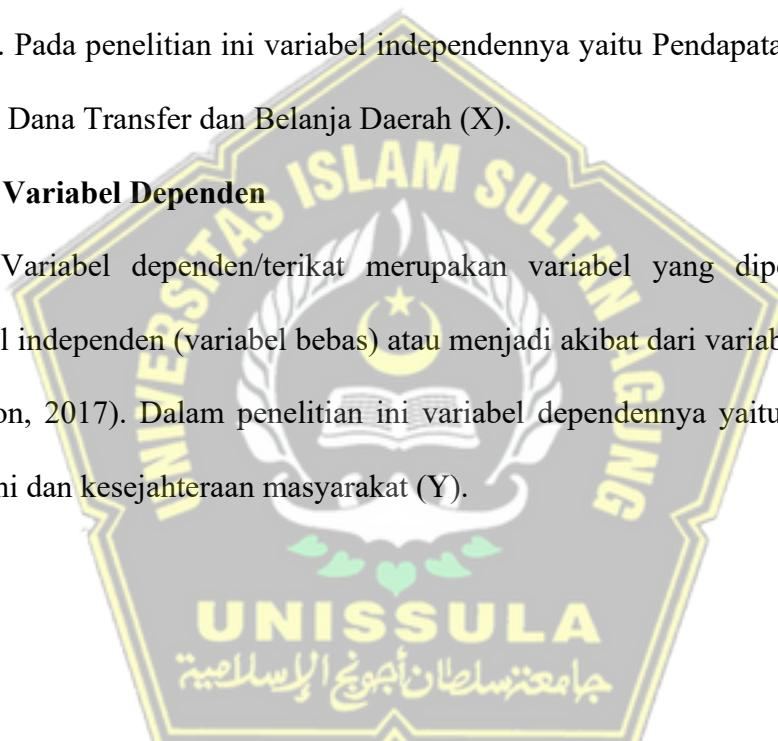
3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independent/bebas/endogen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain dan menjadi penyebab perubahan variabel (Sahir, 2022b). Pada penelitian ini variabel independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Belanja Daerah (X).

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen/terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas) atau menjadi akibat dari variabel independen (Sugiyon, 2017). Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Y).



Tabel 3-3
Variabel dan Indikator

| No | Variabel | Definisi Operasional | Indikator |
|----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Variabel Dependen | | | |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (Y1) | Pertumbuhan ekonomi mengukur perubahan tingkat output ekonomi yang diproduksi suatu daerah, dihitung dengan menggunakan PDRB (Pusat Statistik, 2021). | 1. Laju pertumbuhan PDRB per tahun (dalam persen). |
| Variabel Independen | | | |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) | PAD merujuk pada pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber daya lokal seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (Sugiyono, 2021). | 1. Realisasi PAD per tahun (dalam Rp). |
| 2. | Dana Transfer (X2) | Dana Transfer adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk DAU, DAK, dan DBH, sebagai bagian dari sistem perimbangan fiskal (Tumpal, 2019). | 1. Realisasi Dana Transfer per tahun (DAU, DAK, DBH). (dalam Rp). |
| 3. | Belanja Daerah (X3) | Belanja Daerah adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk operasional, pembangunan, dan pelayanan publik yang didasarkan pada anggaran daerah (Junaidi, 2020). | 1. Realisasi Belanja Daerah per tahun. (dalam Rp). |

3.6 PENGUKURAN VARIABEL

Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur berdasarkan total penerimaan asli daerah yang tercatat dalam laporan keuangan daerah, sedangkan Dana Transfer diukur dari jumlah dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat dan provinsi. Belanja Daerah diukur berdasarkan total pengeluaran daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pertumbuhan Ekonomi diukur menggunakan persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahunan, sedangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Sari & Wibowo, 2020).

Pengukuran variabel ini mengacu pada metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu yang relevan, seperti yang dijelaskan oleh Putra dan Santoso (2019) yang menekankan pentingnya penggunaan data sekunder resmi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Selain itu, pengukuran variabel ekonomi dan sosial menggunakan indikator standar yang telah diakui secara luas dalam literatur akuntansi dan ekonomi daerah (Rahman & Hidayat, 2021).

3.7 METODE ANALISIS DATA

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul sebagaimana bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Dalam penelitian ini menggunakan statistika deskriptif dalam analisisnya (Sugiyono, 2017). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian. Analisis ini mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, modus, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian (Yusuf, 2021).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji hipotesis memerlukan uji asumsi klasik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas yang akan dilaksanakan pada penelitian ini (Ghozali, 2018)

1) Uji Normalitas

Pengujian *Convergent Validity* Dilakukan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05 (Dewata, 2020).

2) Uji Multikolinearitas

Pengujian Menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tolerance. Tidak ada gejala multikolinearitas jika nilai $VIF \leq 10$ dan $tolerance > 0,10$ (Saputra, 2022)

3) Uji Heteroskedastisitas

Dilakukan menggunakan uji *Glejser*. Model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$ (Sofyani & Prayudi, 2018).

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilaksanakan dengan tujuan untuk menaksir pengaruh variabel independen yang lebih dari satu terhadap satu variabel dependen(Ghozali, 2018). Model regresi linear berganda dilaksanakan guna mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linear berganda yang persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \text{ dan}$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Diketahui:

Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi (Variabel dependen 1)

Y_2 = Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Variabel dependen 2)

α = Konstanta

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (variabel independen 1)

X_2 = Dana Transfer (variabel independen 2)

X_3 = Belanja Daerah (variabel independen 3)

β_1 = Koefisien regresi berganda antara X_1 dan Y

β_2 = Koefisien regresi berganda antara X_2 dan Y

β_3 = Koefisien regresi berganda antara X_3 dan Y

e = Eror

3.7.4 Uji Goodness of Fit Model

Keakuratan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai sebenarnya dapat diukur melalui Goodness of Fitnya (Ghozali, 2018). Secara statistik, paling tidak Goodness of Fit dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Perhitungan statistik dianggap signifikan apabila nilai uji statistik berada pada daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya, apabila nilai uji statistik berada dalam daerah H_0 yang diterima, maka dianggap tidak signifikan (Ghozali, 2018).

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dilihat pada Adjusted R^2 (Ghozali, 2018). Variabel independen pada penelitian ini lebih dari dua maka menggunakan Adjusted R^2 . Adjusted R^2 yang menunjukkan angka yang semakin besar yaitu mendekati angka 1, berarti semakin baik model yang digunakan dalam menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila Adjusted R^2 semakin kecil yaitu mendekati angka 0 berarti model semakin lemah dalam menjelaskan variabelitasnya dari variabel dependennya (Ghozali, 2018)

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen penelitian berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$, maka variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model sudah fit dan dapat digunakan pada pengujian selanjutnya.

3.7.5 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah diajukan yaitu menggunakan analisis regresi melalui Uji t. Analisis regresi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial serta untuk mengetahui seberapa besar dominasi variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Metode uji hipotesis yang telah diajukan dilaksanakan melalui pengujian secara parsial.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah satu variabel independen secara individual memiliki pengaruh dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$

maka hipotesis yang telah diajukan diterima dan berarti bahwa individual variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan berarti bahwa individual variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Jawa Tengah, salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak setelah Jawa Barat, yakni 35 kabupaten/kota. Jawa Tengah memiliki keragaman karakteristik geografis, demografis, serta kapasitas fiskal yang beragam. Variasi ini memberikan landasan yang kuat untuk mengevaluasi bagaimana perbedaan pendapatan, transfer, dan belanja daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki struktur ekonomi yang khas. Kabupaten dengan basis pertanian seperti Grobogan atau Pati cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih fluktuatif tergantung pada kondisi musim, sementara kota-kota seperti Surakarta dan Semarang memiliki orientasi jasa dan industri yang lebih stabil. Hal ini berdampak pula pada bagaimana penerimaan asli daerah (PAD) dikumpulkan dan bagaimana belanja daerah dialokasikan, serta sejauh mana transfer pusat (TKDD) dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Daerah yang memiliki PAD tinggi umumnya memiliki kapasitas lebih besar dalam menentukan kebijakan pembangunan tanpa ketergantungan pada dana pusat. Namun, sebagian besar daerah di Jawa Tengah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH), yang dikategorikan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Belanja daerah merupakan instrumen penting yang mencerminkan kebijakan fiskal di tingkat lokal. Dengan alokasi anggaran untuk belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa, pemerintah daerah diharapkan dapat

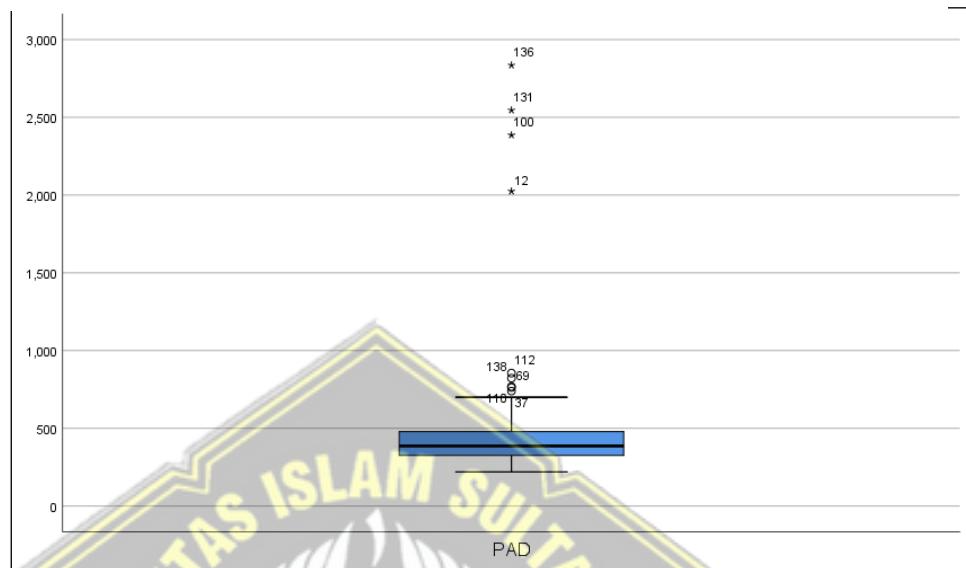
mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun demikian, efektivitas belanja sangat bergantung pada prioritas pembangunan dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Indikator kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Data yang digunakan mencakup periode tahun 2020 hingga 2023, sehingga mencerminkan dinamika terkini pasca pandemi COVID-19 dan kebijakan pemulihran ekonomi yang dilakukan di tingkat daerah.

Pengelolaan Data Outlier dalam Penelitian

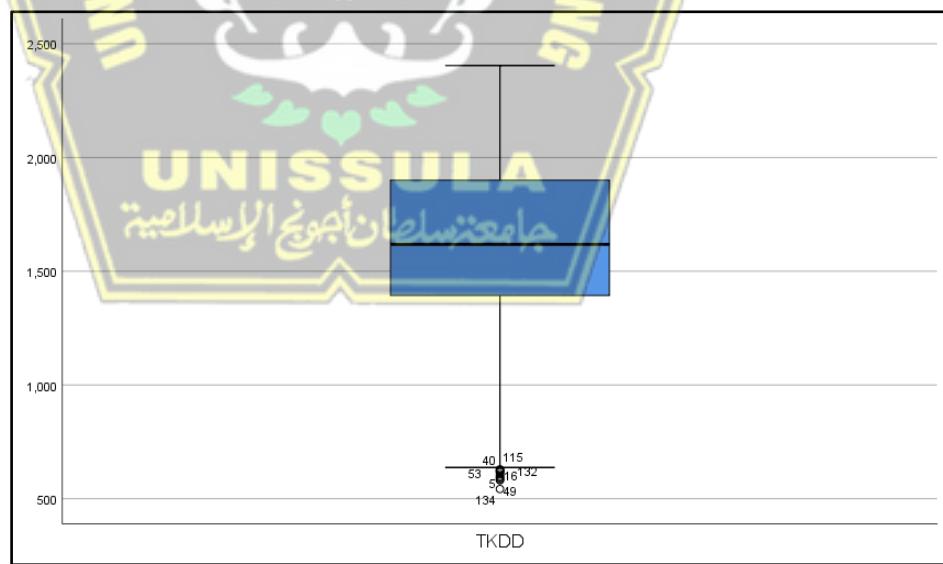
Dari total 140 sampel data yang dikumpulkan, telah dilakukan identifikasi dan eliminasi data outlier menggunakan boxplot sebagai metode visual untuk mendeteksi nilai ekstrim dalam distribusi data. Boxplot memungkinkan peneliti mengamati nilai-nilai yang berada di luar batas wajar yang ditandai dengan garis whiskers (Tukey, 1977; Hubert & Vandervieren, 2008). Data yang berada di luar batas whiskers tersebut dikategorikan sebagai outlier dan dieliminasi untuk menjaga validitas analisis selanjutnya. Setelah proses eliminasi, jumlah data yang digunakan dalam analisis menjadi 110 sampel. Penghapusan outlier ini bertujuan untuk memastikan agar data yang dianalisis memenuhi asumsi klasik statistik seperti normalitas dan homogenitas varians sehingga hasil penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Ani et al., 2020; Schwertman et al., 2004). Prosedur eliminasi dilakukan secara sistematis dan transparan, sehingga menjaga integritas penelitian. Adapun hasil boxplot sebagai berikut :

Gambar 4-2
Boxplot variable PAD



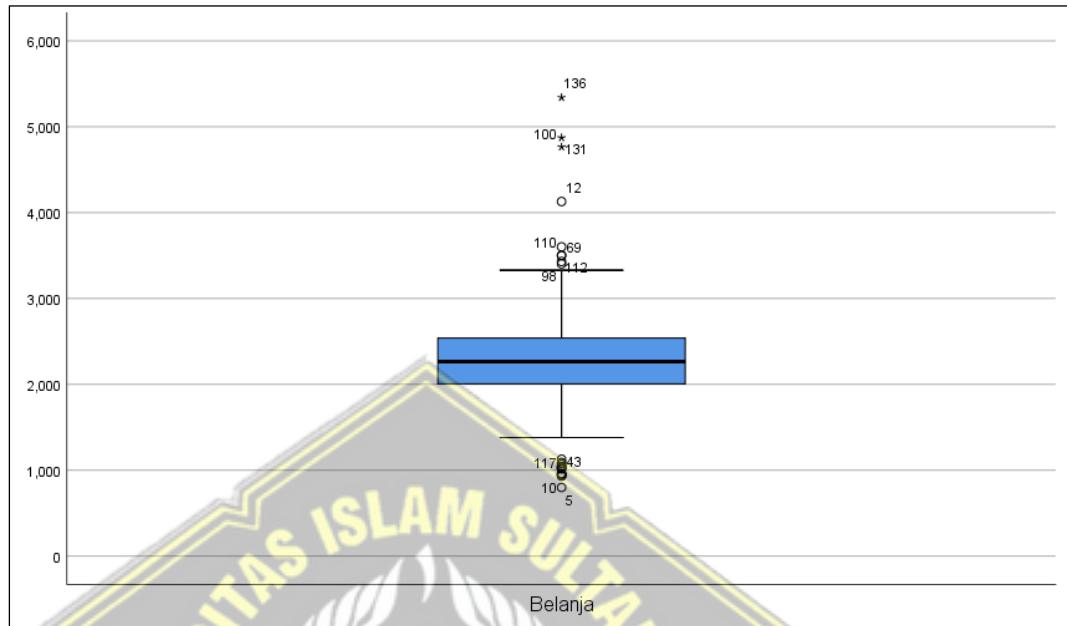
Sumber: Data Sekunder yang telah diolah (2025)

Gambar 4-3
Boxplot variable TKDD



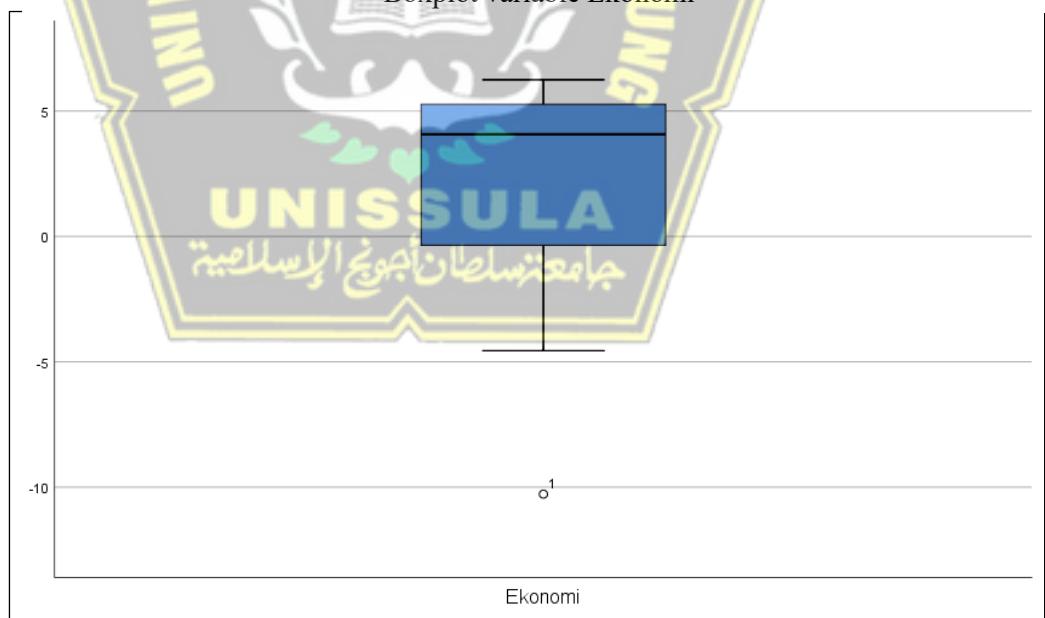
Sumber: Data Sekunder yang telah diolah (2025)

Gambar 4-4
Boxplot variable Belanja



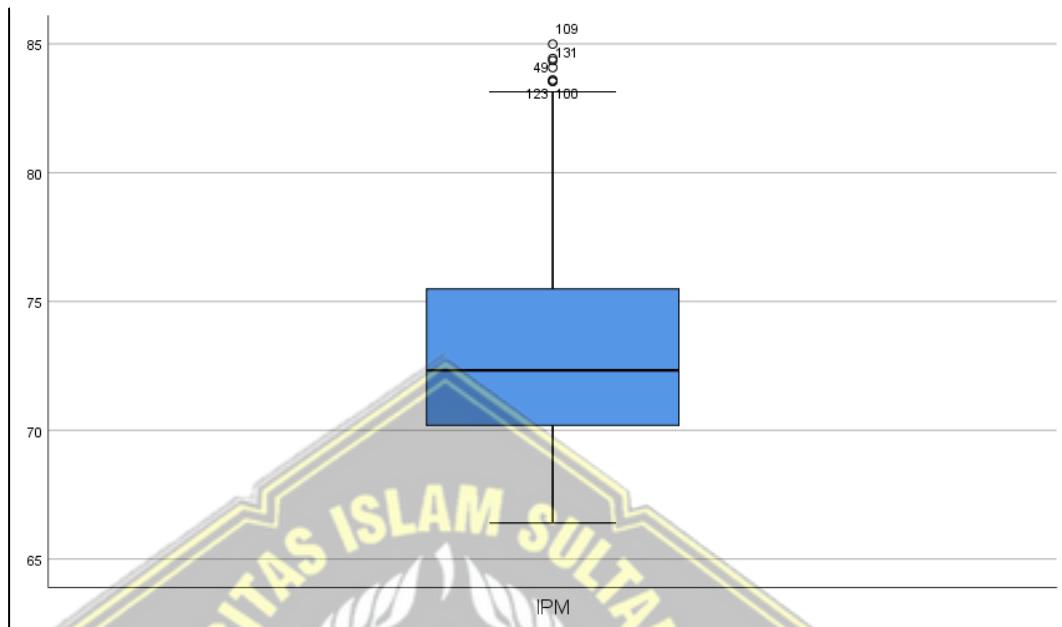
Sumber: Data Sekunder yang telah diolah (2025)

Gambar 4-5
Boxplot variable Ekonomi



Sumber: Data Sekunder yang telah diolah (2025)

Gambar 4-6 Boxplot variable IPM



Sumber: Data Sekunder yang telah diolah (2025)

Dari 5 Gambar diatas total ada 30 data yang Terletak di luar batas whisker boxplot, yang menandakan bahwa nilai-nilai tersebut berada jauh dari pusat distribusi data sehingga berpotensi menjadi nilai ekstrim yang mengacaukan hasil analisis sehingga di eliminasi.

4.2 Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran umum terhadap data yang digunakan, dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap lima variabel utama dalam penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil statistik deskriptif dirangkum dalam Tabel berikut:

Tabel 4-4
Tabel Statistik Deskriptif

| Statistik | PAD | TKDD | Belanja | Ekonomi | IPM |
|-----------|----------------|------------------|------------------|---------|--------|
| N | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| mean | 422.567.000,00 | 1.597.481.000,00 | 2.249.579.000,00 | 3,49 | 72,61 |

| Statistik | PAD | TKDD | Belanja | Ekonomi | IPM |
|-----------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|
| std | 230.397.265,57, | 421.900.351,00 | 614.742.507,00 | 2,28 | 3,88 |
| min | 238.640.000,00 | 581.400.000,00 | 798.350.000,00 | -1.61 | 66,40 |
| 25% | 322.795.000,00 | 1.419.780.000,00 | 2.011.110.000,00 | 2,29 | 70,20 |
| 50% | 375.380.000,00 | 1.618.215.000,00 | 2.283.250.000,00 | 4,01 | 71,56 |
| 75% | 451.540.000,00 | 1.900.042.500,00 | 2.529.797.500,0 | 5,11 | 74,44 |
| max | 2.385.940.000,00 | 2.404.200.000,00 | 4.764.050.000,00 | 5,55 | 84,99 |

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah (2025)

Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif dari seluruh variabel penelitian yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi. Data PAD terdiri dari 110 observasi dengan nilai rata-rata sebesar Rp422.567.000, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri untuk mendukung pembangunan di wilayah penelitian. Variasi data PAD sangat besar, terlihat dari nilai simpangan baku Rp230.397.265,57 yang menandakan adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Nilai minimum PAD yang tercatat sebesar Rp238.640.000 sementara nilai maksimum mencapai Rp2.385.940.000,00, memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara daerah dengan kapasitas pendapatan kecil dan daerah dengan kapasitas pendapatan yang sangat tinggi. Median PAD berada pada angka Rp375.380.000,00, yang lebih rendah dari rata-rata, menunjukkan bahwa distribusi PAD cenderung miring ke kanan (positively skewed), di mana sebagian kecil daerah memiliki PAD jauh lebih besar dari mayoritas daerah lainnya.

Dana Transfer ke Daerah

Data Dana Transfer ke Daerah (TKDD) terdiri dari 110 observasi dengan nilai rata-rata sebesar Rp1.597.481.000,00 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variasi data TKDD juga cukup signifikan dengan simpangan baku sebesar Rp421.900.351,00, yang menunjukkan adanya perbedaan kapasitas penerimaan dana transfer antar daerah. Nilai minimum TKDD tercatat

sebesar Rp581.400.000,00 sedangkan nilai maksimum mencapai Rp 2.404.200.000,00, memperlihatkan rentang yang lebar dalam kapasitas penerimaan dana transfer. Median TKDD sebesar Rp1.618.215.000,00 juga sedikit lebih tinggi dari rata-rata, menandakan distribusi data yang relatif simetris namun dengan kecenderungan pusat data sedikit di atas nilai rata-rata. Variabel TKDD memiliki nilai rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan PAD, yaitu lebih dari 1,7 triliun rupiah. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat berimplikasi terhadap fleksibilitas kebijakan fiskal di daerah, mengingat penggunaan dana transfer sering kali terikat pada peraturan pusat.

Belanja Daerah

Untuk variabel Belanja Daerah, data menunjukkan rentang nilai yang luas, dengan jumlah observasi sama yakni 110. Rata-rata belanja daerah mencapai Rp2.249.579.000,00 dengan simpangan baku Rp614.742.507,00, menunjukkan variasi yang sangat besar antar daerah dalam hal pengeluaran daerah. Nilai minimum belanja sebesar Rp798.350.000,00 dan maksimum yang sangat besar mencapai Rp4.764.050.000,00, menunjukkan adanya disparitas yang signifikan di antara daerah dalam kapasitas pengeluaran. Median belanja sebesar Rp2.283.250.000,00 cukup dekat dengan rata-rata, mengindikasikan distribusi belanja daerah yang relatif seimbang namun tetap terdapat daerah dengan pengeluaran jauh lebih tinggi. Belanja daerah yang rata-rata berada pada kisaran 2,2 triliun rupiah memperlihatkan bahwa alokasi anggaran oleh pemerintah daerah cukup besar. Namun, nilai standar deviasi yang tinggi pada variabel ini juga menunjukkan ketimpangan yang besar antar kabupaten/kota dalam mengalokasikan belanjanya. Ini bisa berkaitan erat dengan kapasitas fiskal serta prioritas pembangunan masing-masing daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Untuk Pertumbuhan Ekonomi, data terdiri dari 110 observasi dengan rata-rata 3,49%, namun dengan variasi yang tinggi, yakni simpangan baku 2,28%. Nilai minimum yang tercatat adalah -1,61%, yang mencerminkan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Nilai maksimum pertumbuhan ekonomi mencapai 5,55%. Median pertumbuhan berada pada 4,01%, yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata, Pertumbuhan ekonomi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kontraksi yang signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan rata-rata pertumbuhan ekonomi bernilai negatif. Kondisi ini mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi yang luas di hampir seluruh wilayah. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2023, terjadi pemulihan ekonomi yang ditandai dengan tren pertumbuhan positif, yang menunjukkan keberhasilan upaya pemulihan perekonomian di daerah-daerah tersebut.".

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data terdiri dari 110 observasi rata-rata sebesar 72,61 dengan simpangan baku 3,88. Nilai minimum IPM sebesar 66,4 dan maksimum mencapai 84,99, menunjukkan perbedaan kualitas pembangunan manusia antar daerah di wilayah Jawa Tengah. Median IPM sebesar 72,33 lebih rendah dari rata-rata mengindikasikan adanya daerah-daerah dengan IPM bawah rata-rata yang cukup signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, yang menjadi perhatian penting dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembangunan manusia.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas dilaksanakan menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov* dan dilakukan 2 kali karena ada dua model, untuk model pertama dengan variable dependen Pertumbuhan ekonomi dengan hasil yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4-5
Hasil uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| N | | 140 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .61860408 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .122 |
| | Positive | .056 |
| | Negative | -.122 |
| Test Statistic | | .122 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .041 ^c |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig. | .216 ^d |
| | 99% Confidence Interval | |
| | Lower Bound | .205 |
| | Upper Bound | .226 |

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 743671174.

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai sig $0,041 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian ini masih belum normal, untuk menormalkan data penelitian ini dilakukan penghilangan outlier yang pertama serta dilakukan uji normalitas yang kedua dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4-6
Hasil Uji Normalitas Kedua

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| N | | 110 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 60.66404419 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .103 |
| | Positive | .103 |
| | Negative | -.068 |
| Test Statistic | | .103 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .057 ^c |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig. | .406 ^d |
| | 99% Confidence Interval | |
| | Lower Bound | .393 |
| | Upper Bound | .419 |

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 112562564.

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas yang keempat dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* setelah penghilangan data *outlier* yang pertama dengan menggunakan *box plot* memperoleh nilai sig. sebesar 0,57 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini normal.

Untuk model kedua dengan variable dependen Indeks Perumbuhan Manusia dengan hasil yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4-7
Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|---|-------------------------|-------------------------|
| N | | 110 |
| Normal Parameters^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.33213980 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .085 |
| | Positive | .085 |
| | Negative | -.064 |
| Test Statistic | | .085 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig. | .663 ^e |
| | 99% Confidence Interval | |
| | Lower Bound | .651 |
| | Upper Bound | .675 |

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 221623949.

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas yang keempat dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* setelah penghilangan data *outlier* yang pertama dengan menggunakan *box plot* memperoleh nilai sig. sebesar 0,2 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan kesulitan dalam mengestimasi parameter model secara akurat, karena variabel independen menjadi tidak bebas satu sama lain. Salah satu indikator yang digunakan adalah

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF suatu variabel < 10 dan nilai Tolerance $> 0,1$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas,

Berikut adalah hasil perhitungan VIF untuk Variable Dependen Pertumbuhan Ekonomi:

Tabel 4-8
Uji Multikolinearitas

| Model | Coefficients ^a | | |
|-------|---------------------------|------|-------|
| | Collinearity Statistics | | |
| | Tolerance | VIF | |
| 1 | TKDD | .158 | 6.349 |
| | Belanja | .133 | 7.502 |
| | PAD | .599 | 1.670 |

a. Dependent Variable: Ekonomi

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel TKKD, Belanja, dan PAD memperoleh nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,1$. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Berikut adalah hasil perhitungan VIF untuk Variable Dependen Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM):

Tabel 4-9
Uji Multikolinearitas

| Model | Coefficients ^a | | |
|-------|---------------------------|------|-------|
| | Collinearity Statistics | | |
| | Tolerance | VIF | |
| 1 | TKDD | .158 | 6.349 |
| | Belanja | .133 | 7.502 |
| | PAD | .599 | 1.670 |

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel TKKD, Belanja, dan PAD memperoleh nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,1$. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan atau tidak.. Salah satu metode yang digunakan adalah uji Glejser, di mana nilai absolut residual diregresikan terhadap variabel independen. Berikut adalah hasil dari uji Glejser terhadap masing-masing variabel:

Tabel 4-10
Uji Glejser Model Pertumbuhan Ekonomi

| Coefficients ^a | | | | |
|---------------------------|------------|-------|--------|------|
| | Model | B | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 4.360 | 6.683 | .000 |
| | PAD | -.022 | -1.554 | .125 |
| | TKDD | -.011 | -1.279 | .205 |
| | Belanja | .031 | 1.991 | .036 |

a. Dependent Variable: Ekonomi

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah (2025)

Tabel 4-11
Uji Glejser Model Indeks Pertumbuhan Manusia

| Coefficients ^a | | | | |
|---------------------------|------------|--------|--------|------|
| | Model | B | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 68.215 | 27.763 | .000 |
| | PAD | .010 | 2.053 | .044 |
| | TKDD | -.009 | -2.935 | .005 |
| | Belanja | .007 | 2.601 | .011 |

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah (2025)

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 baik untuk model Pertumbuhan Ekonomi maupun Indeks Pertumbuhan Manusia. Dengan demikian, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat homogen (homoskedastik), sehingga model memenuhi asumsi klasik regresi.

4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

4.4.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Setelah dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap seluruh variabel penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan uji regresi linier berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Belanja Daerah terhadap dua variabel dependen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari analisis regresi linear berganda pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4-12
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Coefficients ^a | | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
| | B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 4.360 | .652 |
| | PAD | -.022 | .005 |
| | TKDD | -.011 | .003 |
| | Belanja | .031 | .001 |

a. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.12, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 4,36 - 0,22_{\text{PAD}} - 0,11_{\text{TKDD}} + 0,31_{\text{Belanja}}$$

Penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan regresi adalah sebagai berikut:

- Konstanta bernilai 4,36 dengan koefisien positif yang berarti nilai PAD, TKDD, dan Belanja dianggap bernilai 0 atau konstan, maka nilai perusahaan memperoleh nilai 4,36.
- Variabel PAD menghasilkan nilai koefisien negatif 0,22 yang berarti semakin tinggi nilai PAD yang direalisasikan oleh Daerah tidak memiliki dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Variabel TKDD menghasilkan nilai koefisien negatif 0,11 yang berarti semakin tinggi nilai TKDD yang direalisasikan oleh Daerah tidak memiliki dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Variabel Belanja menghasilkan nilai koefisien positif 0,31 yang berarti semakin tinggi nilai Belanja yang direalisasikan oleh Daerah memiliki dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil Uji Godness of FitModel

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dilihat pada nilai *Adjusted R²*. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4-13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|---|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |

| | | | | |
|---|-------------------|------|------|--------|
| 1 | .496 ^a | .221 | .244 | .63230 |
| a. Predictors: (Constant), Belanja,PAD,TKDD | | | | |
| b. Dependent Variable: Ekonomi | | | | |

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2023)

Berdasarkan data pada tabel 4.13, uji koefisien determinasi memperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,244 yang berarti nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa variabel PAD, TKDD, dan Belanja mampu menjelaskan variabel nilai perusahaan sebesar 24,4% sedangkan sisanya sebesar 76,6% dijelaskan oleh variabel lain. Dengan kata lain, variabel independen pada penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 24,4% terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji F dilaksanakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen penelitian berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya. Hasil Uji F pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4-14
Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|---|------------|----------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 1.442 | 3 | 1.481 | 2.702 | .046 ^b |
| | Residual | 26.787 | 97 | .400 | | |
| | Total | 28.229 | 100 | | | |
| a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), Belanja,PAD,TKDD | | | | | | |

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil dari Uji F memperoleh nilai F-hitung sebesar 2.702 dan F tabel sebesar 2,67, dimana nilai F-hitung>F tabel dan nilai sig 0,046<0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat diartikan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, TKDD, dan Belanja secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah satu variabel independen secara individual memiliki pengaruh dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil uji t pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4-15
Hasil Uji t

| Model | UNISS Coefficients ^a | | | | Keputusan |
|-------|---------------------------------|-------|--------|------|-----------|
| | B | t | Sig. | | |
| 1 | (Constant) | 4.360 | 6.683 | .000 | |
| | PAD | -.022 | -1.554 | .125 | Ditolak |
| | TKDD | -.011 | -1.279 | .205 | Ditolak |
| | Belanja | .031 | 1.991 | .036 | Diterima |

a. Dependent Variable: Ekonomi

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil uji t adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -1.554 dan t tabel sebesar 1.98498, dimana nilai t hitung< t tabel dan nilai sig 0,125>0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak, yang berarti PAD yang direalisasikan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Hipotesis 2

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -1.279 dan t tabel sebesar 1.98498, dimana nilai t hitung< t tabel dan nilai sig 0,005>0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 Ditolak, yang berarti TKDD yang direalisasikan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. Hipotesis 3

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1.991 dan t tabel sebesar 1.98498, dimana nilai t hitung> t tabel dan nilai sig 0,036<0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, yang berarti Belanja yang direalisasikan daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4.4.2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Terhadap IPM

Uji regresi linier berganda terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Belanja Daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa

Tengah. Hasil dari analisis regresi linear berganda pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4- 16
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | | Coefficients ^a | | |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|-------|
| | | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | Beta |
| 1 | (Constant) | 68.215 | 2.457 | |
| | PAD | .010 | .005 | -.270 |
| | TKDD | -.009 | .003 | .753 |
| | Belanja | .007 | .003 | .726 |

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2023)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.12, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$IPM = 68.215 + 0,01_{PAD} - 0,09_{TKDD} + 0,07_{Belanja}$$

Penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan regresi adalah sebagai berikut:

- Konstanta bernilai 68.215 dengan koefisien positif yang berarti nilai PAD, TKDD, dan Belanja dianggap bernilai 0 atau konstan, maka nilai perusahaan memperoleh nilai 68.215.
- Variabel PAD menghasilkan nilai koefisien positif 0,01 yang berarti semakin tinggi nilai PAD yang direalisasikan oleh Daerah memiliki dampak terhadap tingginya Indeks Pembangunan Manusia.
- Variabel TKDD menghasilkan nilai koefisien negatif 0,09 yang berarti semakin tinggi nilai TKDD yang direalisasikan oleh Daerah tidak memiliki dampak apapun terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

- Variabel Belanja menghasilkan nilai koefisien positif 0,07 yang berarti semakin tinggi nilai Belanja yang direalisasikan oleh Daerah memiliki dampak terhadap tingginya Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil Uji Godness of FitModel

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dilihat pada nilai *Adjusted R²*. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4-17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary ^b | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .552 ^a | .305 | .374 | 2.38378 |
| a. Predictors: (Constant), Belanja, PAD, TKDD | | | | |
| b. Dependent Variable: IPM | | | | |

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2023)

Berdasarkan data pada tabel 4.13, uji koefisien determinasi memperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,374 yang berarti nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa variabel PAD, TKDD, dan Belanja mampu menjelaskan variabel nilai perusahaan sebesar 37,4% sedangkan sisanya sebesar 62,6% dijelaskan oleh variabel lain. Dengan kata lain, variabel independen pada penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 37,4% terhadap variabel dependen.

Uji F

Uji F dilaksanakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen penelitian berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya. Hasil Uji F pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4-18 Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 167.117 | 3 | 55.706 | 5.803 | .000 ^b |
| | Residual | 380.721 | 97 | 5.682 | | |
| | Total | 547.838 | 100 | | | |

a. Dependent Variable: IPM
b. Predictors: (Constant), Belanja, PAD, TKDD

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil dari Uji F memperoleh nilai F-hitung sebesar 5,803 dan F tabel sebesar 2,67, dimana nilai $F\text{-hitung} > F\text{ tabel}$ dan nilai $\text{sig } 0,00 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat diartikan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, TKDD, dan Belanja secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Manusia.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah satu variabel independen secara individual memiliki pengaruh dalam

menerangkan variasi variabel independen. Hasil uji t pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4-19
Hasil Uji t

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|------------|--------|--------|------|-----------|
| Model | | B | t | Sig. | Keputusan |
| 1 | (Constant) | 68.215 | 27.763 | .000 | |
| | PAD | .010 | 2.053 | .044 | Diterima |
| | TKDD | -.009 | -2.935 | .005 | Ditolak |
| | Belanja | .007 | 2.601 | .011 | Diterima |

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil uji t adalah sebagai berikut:

4. Hipotesis 4

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.053 dan t tabel sebesar 1.98498, dimana nilai t hitung>t tabel dan nilai sig 0,044<0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima, yang berarti PAD yang direalisasikan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Daerah.

5. Hipotesis 5

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -2.935 dan t tabel sebesar 1.98498, dimana nilai t hitung<t tabel dan nilai sig 0,005>0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_5 Ditolak, yang berarti TKDD yang

direalisasikan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Daerah.

6. Hipotesis 6

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.601 dan t tabel sebesar 1.98498, dimana nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai sig 0,011 $<$ 0,05.

Maka dapat disimpulkan bahwa H_6 diterima, yang berarti Belanja yang direalisasikan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Daerah.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -1.554 dan t tabel sebesar 1.98498, dimana nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig 0,125 $>$ 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak, yang berarti PAD yang direalisasikan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah yang diteliti selama periode pengamatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD belum secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini dapat terjadi karena PAD yang diperoleh daerah masih banyak dialokasikan untuk pengeluaran rutin dan konsumsi yang tidak produktif, sehingga kontribusinya terhadap investasi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah menjadi terbatas. Kondisi ini sejalan dengan studi Empiris oleh Sari dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas penggunaan PAD sangat menentukan dampak PAD terhadap pertumbuhan ekonomi; apabila PAD lebih

banyak digunakan untuk kebutuhan administratif dan operasional, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung minim.

Selain itu, faktor kapasitas pengelolaan keuangan daerah juga memegang peranan penting dalam mengoptimalkan kontribusi PAD. Pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat biasanya kesulitan memaksimalkan manfaat PAD untuk pembangunan daerah. Penelitian oleh Prasetya et al. (2020) mengungkapkan bahwa kapasitas administrasi dan tata kelola yang kurang optimal akan menghambat konversi PAD menjadi pertumbuhan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, keberhasilan PAD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada besar kecilnya PAD itu sendiri, namun juga pada bagaimana PAD tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk proyek-proyek produktif yang mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

Lebih jauh, pengaruh PAD juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan sinergi dengan sumber pendanaan lainnya, misalnya dana transfer pusat (TKDD) dan belanja daerah. Studi oleh Wijayanto dan Farida (2022) menegaskan pentingnya sinergi antara PAD, TKDD, dan belanja daerah yang produktif agar dapat memberikan efek sinergis terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, keberpihakan pada belanja produktif yang berkorelasi positif dengan PAD menjadi strategi yang krusial untuk mengatasi keterbatasan dampak langsung PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini memperkuat pentingnya kebijakan fiskal daerah yang tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan PAD, tetapi juga pengelolaan dan alokasi yang strategis serta kolaborasi antar sumber pendanaan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini selaras hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2021) dan Wijayanto dan Farida (2022) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh

Fajrin et al. (2020) dan Wahyuni et al. (2020) menunjukkan hasil sebaliknya bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4.5.2 Pembahasan Pengaruh Dana Transfer terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -1.279 dan t tabel sebesar 1.98498 , dimana nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai sig $0,005 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 Ditolak, yang berarti TKDD yang direalisasikan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Transfer Keuangan dari Pemerintah Daerah (TKDD) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah yang diteliti. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun TKDD secara teori merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik, alokasi dan penggunaan TKDD belum mampu meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak signifikan secara makro. Hal ini dapat terjadi karena TKDD lebih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin atau operasional, sehingga efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi terbatas.

Penelitian serupa juga menguatkan hasil ini, misalnya studi oleh Siregar dan Wibowo (2019) yang menyatakan bahwa alokasi dana transfer seperti TKDD kurang memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena masalah efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut di tingkat daerah. Selain itu, penelitian oleh Ramadhani dan Yunita (2021) menunjukkan bahwa pengaruh TKDD terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan untuk investasi produktif, bukan sekadar pengeluaran konsumtif. Oleh karena itu, tanpa penerapan manajemen yang tepat dan perencanaan yang terarah, TKDD tidak bisa secara langsung meningkatkan daya tarik ekonomi daerah.

Namun demikian, ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil berbeda, dengan adanya pengaruh positif TKDD terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika dana tersebut diarahkan untuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat basis ekonomi daerah. Misalnya, Ardiansyah et al. (2020) menemukan bahwa TKDD yang digunakan secara efektif untuk investasi publik dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan TKDD dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada konteks pengelolaan dan fokus penggunaan dana transfer tersebut.

Hasil penelitian ini selaras hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh oleh Ramadhani dan Yunita (2021) dan Siregar dan Wibowo (2019) yang menyatakan TKDD kurang memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena masalah efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut di tingkat daerah, dan penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah et al. (2020) menemukan bahwa TKDD yang digunakan secara efektif untuk investasi publik dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4.5.3 Pembahasan Pengaruh Belanja Daerah terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1.991 dan t tabel sebesar 1.98498, dimana nilai t hitung>t tabel dan nilai sig 0,036<0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, yang berarti Belanja yang direalisasikan daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menguatkan bahwa alokasi anggaran pemerintah daerah, terutama belanja modal dan investasi yang menyentuh sektor-sektor produktif, dapat memberikan dorongan positif dalam membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah. Dengan belanja daerah yang tertata dan tepat sasaran, dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi

dan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi terlihat jelas, sehingga mempercepat proses pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini. Misalnya, Wahyuni et al. (2020) menemukan bahwa belanja modal daerah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Pratama et al. (2019) pun menegaskan bahwa belanja daerah, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer, merupakan faktor penting yang memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Fajrin et al. (2020) menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah yang difokuskan pada pengembangan fisik dan sosial secara nyata berdampak positif terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Namun demikian, efektivitas belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada pengelolaan dan prioritas penggunaan anggaran tersebut. Belanja yang tidak efisien atau dialokasikan untuk pengeluaran yang tidak produktif bisa saja tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, serta mengarahkan belanja daerah pada sektor-sektor dengan multiplier effect yang tinggi agar belanja tersebut bisa menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini selaras hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2020) dan Pratama et al. (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal daerah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, dan penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Haryanto (2018) belanja daerah yang lebih banyak digunakan untuk belanja rutin atau pengeluaran tidak produktif tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena kurangnya multiplier effect yang muncul.

4.5.4 Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.053 dan t tabel sebesar 1.98498, dimana nilai t hitung>t tabel dan nilai sig 0,044<0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang berarti PAD yang direalisasikan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Daerah.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur sosial, dan mengembangkan program-program kesejahteraan masyarakat. Dengan alokasi PAD yang semakin optimal, pemerintah dapat lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Namun demikian, efektivitas PAD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dialokasikan dan dikelola. Bila PAD lebih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin tanpa keberpihakan kepada program produktif, maka dampaknya terhadap kesejahteraan bisa menjadi terbatas. Santoso dan Putri (2020) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan penggunaan PAD yang tepat sangat diperlukan agar dana tersebut mampu mendorong peningkatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan PAD yang efektif menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Sari dan Nugroho (2019) dan Wulandari et al. (2021) mengemukakan bahwa PAD yang diperoleh dari

sektor pajak dan retribusi daerah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial strategis, yang secara langsung memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan fasilitas dan layanan publik. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan Santoso dan Putri (2020) dan Prabowo dan Iskandar (2018) di beberapa daerah, peningkatan PAD belum mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena adanya permasalahan dalam tata kelola keuangan daerah dan kurangnya prioritas pada program-program pro-rakyat.

4.5.5 Pembahasan Pengaruh Dana Transfer terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -2.935 dan t tabel sebesar 1.98498 , dimana nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig $0,005 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_5 Ditolak, yang berarti TKDD yang direalisasikan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Daerah.

Hasil analisis data pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Dana Transfer tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah secara nominal cukup besar, efektivitas pemanfaatan dana tersebut dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal atau belum berdampak langsung secara signifikan. Kondisi ini bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor, seperti mekanisme alokasi, penyaluran, dan penggunaan dana yang belum tepat sasaran atau tidak fokus pada program-program yang langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

ketidaksignifikanan pengaruh Dana Transfer pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan semata-mata karena besaran dana yang disalurkan, melainkan lebih pada aspek kualitas tata kelola dan implementasi program di tingkat daerah. Dana yang besar tanpa diiringi perencanaan strategis yang matang, pengawasan transparan, serta partisipasi aktif dari masyarakat cenderung kurang berdampak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan dan administrasi di pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam mengoptimalkan manfaat Dana Transfer. Oleh karena itu, fokus perbaikan harus diarahkan pada penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme evaluasi yang efektif guna memastikan dana tersebut dapat benar-benar menyentuh sasaran dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga menemukan bahwa Dana Transfer tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Misalnya, penelitian oleh Putra dan Wibowo (2020) menyebutkan bahwa dana transfer seringkali mengalami kebocoran atau penggunaan yang kurang efektif sehingga tidak maksimal dalam meningkatkan indikator kesejahteraan. Selain itu, Susanti dan Rahman (2019) menegaskan bahwa transfersi dana harus didukung oleh tata kelola yang baik dan perencanaan pembangunan yang tepat agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Tetapi tidak sejalan dengan Rahmawati dan Sari (2021) menemukan bahwa Dana Transfer yang

dialokasikan secara tepat dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik serta program sosial dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

4.6.6 Pembahasan Pengaruh Belanja Daerah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.601 dan t tabel sebesar 1.98498, dimana nilai t hitung > t tabel dan nilai sig 0,011 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, yang berarti Belanja yang direalisasikan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Daerah.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Belanja Daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan bahwa alokasi anggaran belanja yang tepat, terutama yang difokuskan pada sektor-sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara langsung. Belanja pemerintah yang memadai memungkinkan akses masyarakat terhadap layanan dasar meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi daerah serta menurunkan angka kemiskinan.

Dari sisi analisis mendalam, pengaruh positif belanja daerah ini dapat dijelaskan melalui efektivitas mekanisme distribusi dan pemanfaatan anggaran dalam mendukung kebijakan pro-rakyat. Belanja yang terencana dan terarah berkontribusi pada peningkatan kapasitas layanan publik serta menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli dan

kesejahteraan individu maupun komunitas. Namun, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan transparan, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran. Tanpa itu, meskipun anggaran besar dialokasikan, dampak kesejahteraan yang diharapkan bisa terhambat oleh masalah seperti korupsi, pemborosan, dan kesalahan sasaran penggunaan dana.

Analisis data ini juga memperlihatkan bahwa meskipun belanja daerah memiliki korelasi positif signifikan dengan peningkatan kesejahteraan, terdapat variabilitas dampak antar wilayah yang dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah masing-masing dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas manajemen keuangan daerah dan penerapan prinsip akuntabilitas menjadi kunci agar peningkatan belanja bisa berkontribusi secara maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian misalnya Dewi dan Suryanto (2018) menyatakan bahwa peningkatan belanja daerah yang tepat sasaran dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Namun, tidak sejalan dengan penelitian oleh Gunawan (2020), yang menemukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah tidak selalu berbanding lurus dengan capaian kesejahteraan masyarakat jika tidak diimbangi dengan pemberian struktur kelembagaan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, TKDD, dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh PAD, TKDD, dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka hipotesis 1 ditolak. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi disebabkan oleh PAD yang diperoleh daerah masih banyak dialokasikan untuk pengeluaran rutin dan konsumsi yang tidak produktif, sehingga kontribusinya terhadap investasi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah menjadi terbatas.
2. TKDD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka hipotesis 2 ditolak. TKDD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi disebabkan oleh TKDD lebih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin atau operasional, sehingga efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi terbatas.
3. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka hipotesis 3 diterima. Belanja Daerah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi disebabkan karena alokasi anggaran pemerintah daerah, terutama belanja modal dan investasi yang menyentuh sektor-sektor produktif, dapat memberikan dorongan positif dalam membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.

4. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, maka hipotesis 4 diterima. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi disebabkan karena peningkatan PAD memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur sosial, dan mengembangkan program-program kesejahteraan masyarakat.
5. TKDD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, maka hipotesis 5 ditolak. TKDD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat disebabkan oleh alokasi, penyaluran, dan penggunaan dana TKDD yang belum tepat sasaran atau tidak fokus pada program-program yang langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
6. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka hipotesis 3 diterima. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat disebabkan karena alokasi anggaran belanja yang tepat, terutama yang difokuskan pada sektor-sektor pelayanan publik seperti kesehatan,

pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara langsung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain:

1. Berdasarkan nilai dari *Adjusted R²* hanya diperoleh nilai sebesar 0,244 yang berarti variabel independen yang terdiri dari PAD, TKDD, dan Belanja Daerah mempengaruhi variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi hanya sebesar 24,4% sedangkan sisanya sebesar 76,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya.
2. Berdasarkan nilai dari *Adjusted R²* hanya diperoleh nilai sebesar 0,374 yang berarti variabel independen yang terdiri dari PAD, TKDD, dan Belanja Daerah mempengaruhi variabel dependen yaitu Kesejahteraan Masyarakat hanya sebesar 37,4% sedangkan sisanya sebesar 62,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya.
3. Pengukuran TKDD dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi atau kinerja pemerintah juga mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal lain, seperti kondisi ekonomi nasional, inflasi, perubahan regulasi secara mendadak, dan faktor pandemi (misalnya COVID-19) yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan atau dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.3 Saran Penelitian

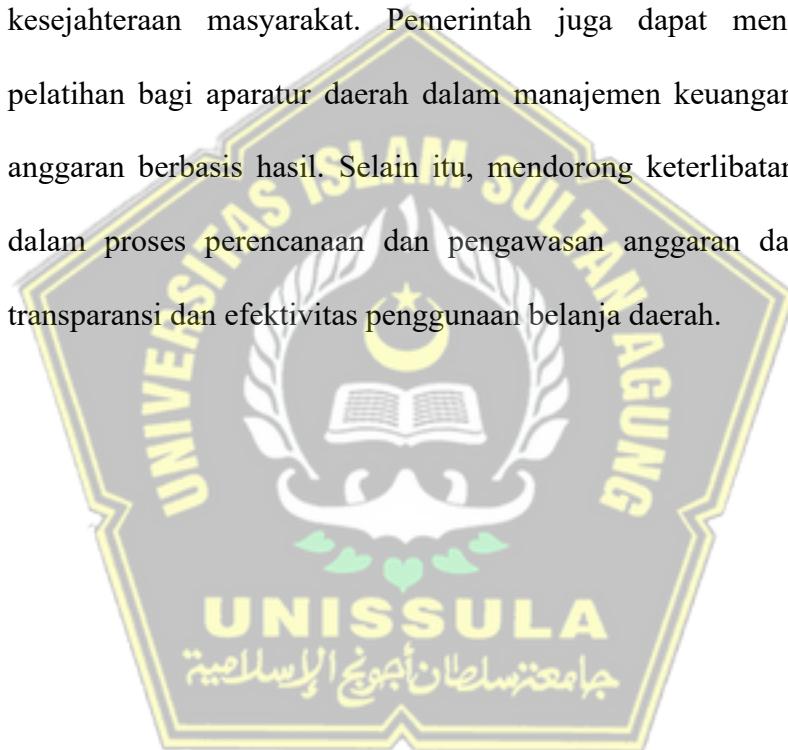
Berdasarkan adanya keterbatasan pada penelitian ini, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel pengaruh lain yang diduga memiliki peran signifikan dalam memediasi atau memoderasi hubungan antara belanja daerah dan kesejahteraan masyarakat, seperti kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi pada pengelolaan keuangan daerah. Variabel-variabel ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas alokasi belanja dalam menghasilkan dampak kesejahteraan. Pendekatan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa tata kelola dan transparansi keuangan daerah berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Ayaru et al., 2020; Pratama & Yusuf, 2017). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran terbukti meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas belanja pemerintah (Rusdiana et al., 2019). Lebih lanjut, penelitian dengan pendekatan mixed methods yang mengkombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan cakupan yang lebih menyeluruh, khususnya untuk memahami hambatan dan faktor keberhasilan dalam implementasi belanja daerah. Contohnya, studi oleh Amalia dan Rahman (2021) yang melakukan studi lapangan bersama analisis statistik memperkuat pemahaman dampak tata kelola dan inovasi dalam pembelanjaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini mendorong pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran daerah melalui penguatan sistem tata kelola keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Disarankan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap alokasi dan realisasi belanja daerah guna memastikan dana digunakan sesuai prioritas pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga dapat menginisiasi program pelatihan bagi aparatur daerah dalam manajemen keuangan dan perencanaan anggaran berbasis hasil. Selain itu, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan belanja daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, J. R., Sudrajat, G. A., & Pringgodani, M. G. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus pada Kabupaten Sampang tahun 2013-2022. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2), 160-179.
- Amalia, T., & Rahman, F. (2021). Mixed Methods Approach to Local Government Spending Efficiency and Social Welfare Improvements. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 15(3), 210-225.
- Ardiansyah, H., et al. (2020). Peran Dana Transfer terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Ayaru, M. A., Tandililing, L., & Rahman, D. (2020). The Effect of Good Governance on Public Service Quality and Regional Development in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45-61.
- Busra. (2014). Penerapan balanced scorecard sebagai dukungan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal*, 5, 1–12.
- Dawa, D. (2020). The impact of balanced scorecard (BSC) on performance of public organization: The case of Dire Dawa City Government Communication Affairs Bureau. *Public Policy and Administration Research*, 10(4), 27–59. <https://doi.org/10.7176/PPAR>
- Dewi, N. K., & Suryanto, A. (2018). Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Elya Dasuki, R. (2021). Manajemen strategi: Kajian teori resource based view. Coopetition: *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(3), 447–454. <https://doi.org/10.22219/co-opetition.v12i3.14322>
- Fajrin, et al. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Universitas Sam Ratulangi*.
- Ferreira, J. J. M., Fernandes, C. I., & Veiga, P. M. (2024). The effects of knowledge spillovers, digital capabilities, and innovation on firm performance: A moderated mediation model. *Technological Forecasting and Social Change*, 200, 123086. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123086>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill Education.

- Gunawan, A. (2020). Belanja Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan: Studi terhadap Dinamika Pengelolaan Sumber Daya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Herning. (2019). Manajemen strategi 4.0. Hernin Indriastuti.
- Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. (2024). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) 2023.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (4th ed.). Penerbit Andi.
- Marpaung, R., & Hidayat, S. (2019). Manajemen Keuangan Daerah dan Dampaknya pada Kesejahteraan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Prabowo, A., & Iskandar, D. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Pratama, et al. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Neliti*.
- Pratama, I. G. N., & Yusuf, M. (2017). Transparency and Accountability in Local Government Financial Management and Its Effect on Public Satisfaction. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 4(2), 112-130.
- Pratama, R., & Nugroho, H. (2021). Pengaruh Belanja Publik terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Putra, A., & Wibowo, B. (2020). Efektivitas Dana Transfer dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Rahayu, R., Riski, S., & Juita, V. (2020). Kapabilitas teknologi informasi, kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(1), 54–66. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jrat/article/view/1234>
- Ramadhani, N., & Yunita, S. (2021). Efektivitas Dana Transfer Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Administrasi Fiskal*.
- Rasidi, R., & Sadmoko, R. (2019). Penerapan konsep balanced scorecard dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 189–202. <https://doi.org/10.21831/widya.v45i2.27077>
- Rahmawati, D., & Sari, N. (2021). Pengaruh Dana Transfer terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah. *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- Rusdiana, T., Hidayat, R., & Sari, R. P. (2019). Community Participation and Its Influence on Local Government Budget Accountability. *Jurnal Partisipasi dan Demokrasi*, 3(1), 25-40.
- Sahir, S. H. (2022). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia.

- Santoso, B., & Putri, R. (2020). Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*.
- Santoso, B., et al. (2021). Tata Kelola Dana Transfer dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sari, D., & Nugroho, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sarmigi, E., & Maryanto, M. (2020). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan good governance terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 8(1), 153–162.
<https://doi.org/10.24090/jae.v8i1.3349>
- Siregar, A., & Wibowo, A. (2019). Pengaruh Dana Transfer Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sugiyono. (2014). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian, kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta.
- Susanti, A., & Haryanto, B. (2018). Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Susanti, R., & Rahman, F. (2019). Pengelolaan Dana Transfer dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Wahyudi, T., et al. (2021). Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Wahyuni, et al. (2020). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Wibisono, F. (2019). Efektivitas Belanja Daerah dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Kebijakan Fiskal*.
- Wulandari, F., et al. (2021). Analisis Dampak PAD terhadap Pembangunan Infrastruktur Sosial di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*.